warta fiskal

waspada antisipatif responsif

Hasil Nyata ASEAN Chairmanship Indonesia

ASEAN *Forum on Taxation* sebagai Wadah Koordinasi Implementasi Pilar Dua Negara ASEAN

Wawancara: Kali Ketiga, Unjuk Gigi Keketuaan Indonesia dalam ASEAN

Menilik Potensi Inisiatif ASEAN+3 DRF bagi Upaya Pengelolaan Risiko Bencana di Indonesia

Warta Fiskal dapat diunduh melalui website fiskal.kemenkeu.go.id

atau silahkan pindai QRcode dibawah ini:

Diterbitkan oleh:
Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI

Penanggung Jawab:
Dini Kusumawati

Dewan Redaksi:
Syahrir Ika, Endang Larasati, Sofia Arie Damayanty, Agunan P. Samosir, Hadi Setiawan, Adelia Surya Pratiwi

Tim Redaksi:
Fatima Medina Septiyanti, Cornelius Tjahjaprijadi, Rita Helbra Tenrini, Sidiq Suryo Nugroho, Afif Hanifah, Rosyid Bagus Ginanjar Habibi, Indha Sendary, Chintya Pramasanti, Cessa Seftari, Indrawan Susanto, Patria Yoga Asmara, Mohamad Nasir, Angga Eko Prasetyo Wirastomo, Anggi Pratiwi

Desain Grafis:
Mochammad Bentar Prakoso

Sekretariat:
Lutfi Nursela Feninsa

Redaksi menerima tulisan/artikel dari pembaca mengenai berbagai topik di bidang fiskal. Tulisan seyogyanya mengulas isu-isu aktual dan tidak hanya sekedar ulasan tertulis.Panjang naskah antara 1200-1400 kata di luar tabel dan grafik.

Silahkan kirim ke: wartafiskal@kemenkeu.go.id

Hasil Nyata ASEAN *Chairmanship* Indonesia

Syahrir Ika[1]

Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara atau *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pendirian ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Lalu, Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984, Viet Nam pada 28 Juli 1995, Laos PDR dan Myanmar pada 23 Juli 1997, serta Kamboja pada 30 April 1999. Indonesia juga memiliki nilai sejarah yang penting dalam konteks ASEAN karena KTT ASEAN pertama diselenggarakan di Bali, pada 23-24 Februari 1976.

Indonesia telah menjadi Keketuaan ASEAN pada 1976, 2003, 2011, dan 2023. Keketuaan ASEAN tahun 2023 mengambil tema *"ASEAN Matters: Epicentrum of Growth"*. Dengan mengemban keketuaan, Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting bagi masyarakat Asia Tenggara dan Dunia. Indonesia juga ingin menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan kawasan dan dunia, inilah makna dari kalimat *"Epicentrum of Growth"*. Coba kita buka data, bagaimana peta Indonesia dalam ASEAN, dan peta ASEAN dalam Dunia?

Ternyata, Indonesia masih mempertahankan statusnya sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN (Bank Dunia, 2021). Pada tahun 2021, angkanya mencapai 1.186,09 miliar dolar AS, nilai itu sama dengan 2,34 kali Thailand, 2,98 kali Singapura, 3 kali Filipina, 3,19 kali Malaysia, 3,27 kali Vietnam, 18,24 kali Miyanmar, 40,89 kali Kamboja, 65,8 kali Laos, dan 84,7 kali Brunei Darussalam. Pada

[1]Dewan Redaksi Warta Fiskal

tahun 2022, PDB ASEAN sebesar 3,9 triliun dolar AS atau sekitar 3,6% dari PDB Global. Indonesia masih yang tertinggi menyumbang sebesar 1,390 miliar dolar AS (IMF, 2022). Nilai itu sama dengan 2,39 kali Thailand, 2,96 kali Malaysia, 2,97 kali Singapura, Vietnam, dan Kamboja, serta 22 kali Myanmar. Dengan posisi ini, PDB Indonesia menduduki peringkat ke-14 atau satu tingkat di atas Arab Saudi.

Dengan kekuatan ekonomi terbesar, berarti Indonesia juga menjadi pasar terbesar ASEAN, akan tetapi apakah Indonesia mengambil manfaat lebih besar (surplus) atau sebaliknya lebih rendah (defisit). Neraca perdagangan Indonesia-Singapura selalu defisit sejak 2008. Neraca perdagangan Indoneia-Thailand juga defisit sejak tahun 2020, sebaliknya nercara perdagangan Indonesia-Malaysia, Indonesia-Vietnam dan Indonesia-Filipina selalu surplus. Indonesia masih harus kerja keras agar tidak saja merajai ASEAN dari sisi PDB, tetapi juga harus lebih maju dan makmur. Untuk yang satu ini, Indonesia masih kalah dengan beberapa negara ASEAN, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. PDB per kapita Indonesia berada di peringkat 5 ASEAN (4.316 US Dolar), di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thaland (IMF, 2023).

Kekalahan ini bukan karena penduduknya banyak, melainkan karena penduduknya kalah produktif dan kalah bersaing. Data kekalahan Indonesia diantaranya adalah Global Competitive Index Indonesia berada di peringkat 34 dunia di bawah Singapura (4), Thailand (30) dan Malaysia (27). Lalu, Indeks daya saing Digital Indonesia berada di peringkat 51 Dunia di bawah Singapura (4), Malaysia (31) dan Thailand (40). Selanjutnya, *Human Development Index* (HDI) Indonesia walaupun mengalami kenaikan dalam 10 tahun terakhir akan tetapi masih berada di peringkat 130 dari 199 negara, posisi Indonesia berada di bawah Singapura, Thailand, dan Malaysia. Makna dibalik angka-angka ini adalah Indonesia harus mendayung minimal dua kali lebih cepat dibanding dengan lajunya Singapura, Thailand, dan Malaysia, agar bisa merebut pasar ASEAN.

Sebagai ASEAN *leader*, Indonesia dapat membantu membangun stabilitas dan perdamaian di kawasan ASEAN, sekaligus mendorong tindakan nyata menghadapi tantangan dan risiko regional maupun global. Sebagai salah satu negara yang terkenal dengan kekayaan alam dan budaya, Indonesia memiliki banyak potensi pariwisata, sehingga kesempatan menjadi tuan rumah diharapkan dapat menjadi ajang promosi untuk menarik perhatian dari negara-negara ASEAN lainnya. Memegang Keketuan ASEAN juga menjadi momen memperlihatkan kemajuan ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh dan tangguh, meski berada di tengah badai krisis. Dengan begitu, ke depannya Indonesia dipandang layak menjadi area bisnis yang menarik investasi asing, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan banyak lapangan kerja. Semoga semua ini menjadi Nyata. Demikian editorial, selamat membaca.

DAFTAR ISI

FOKUS

7 Dukungan Sektor Keuangan ASEAN untuk Penguatan Ketahanan Pangan di Kawasan

11 ASEAN *Forum on Taxation* sebagai Wadah Koordinasi Implementasi Pilar Dua Negara ASEAN

15 Masa Depan Pembiayaan Infrastruktur di Kawasan ASEAN

19 Inisiatif Penanggulangan Bencana di Kawasan ASEAN

23 Kerja Sama Keuangan ASEAN+3: Sejarah, Perkembangan, dan Capaian Keketuaan Bersama Indonesia-Jepang

27 Menilik Potensi Inisiatif ASEAN+3 DRF bagi Upaya Pengelolaan Risiko Bencana di Indonesia

WAWANCARA

31 Kali Ketiga, Unjuk Gigi Keketuaan Indonesia dalam ASEAN

ANALISIS

35 Kerja Sama Indo-Pacific Economic Framework (IPEF): Sebuah Inisiatif Baru

40 *Digital Trade* Indonesia dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi Digital Kawasan ASEAN

43 Jalan Panjang Negosiasi Jasa Keuangan ASEAN

48 Dukungan Insentif Perpajakan untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Tekstil

53 **INSPIRASI, SERBA-SERBI, RENUNGAN**

64 **FISKALISTA, RESENSI, GLOSARIUM**

Dukungan Sektor Keuangan ASEAN untuk Penguatan Ketahanan Pangan di Kawasan

Hendrawan Tri S[2]

Keketuaan ASEAN secara resmi telah diserahkan kepada Laos pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 bulan September 2023 di Jakarta, tetapi beberapa agenda prioritas keketuaan Indonesia masih terus berlanjut pembahasannya pada keketuaan ASEAN berikutnya. Salah satu hasil KTT yang juga menjadi *Priority Economic Deliverable* (PED) Indonesia adalah disahkannya *ASEAN Leaders Declaration (LD) on Strengthening Food Security and Nutrition in Times of Crises*. Deklarasi tersebut menyatukan peran seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung ketahanan pangan di ASEAN. Isi deklarasi juga memfasilitasi bagaimana negara-negara ASEAN bekerjasama memperkuat ketahanan pangan di kawasan serta merespons berbagai tantangan global.

Pembahasan agenda penguatan ketahanan pangan dilatarbelakangi oleh berbagai tantangan global dan kawasan serta upaya pemenuhan target pembangunan berkelanjutan yang memberikan dampak pada ketahanan pangan. Konflik di Ukraina dalam beberapa tahun terakhir telah mengganggu rantai pasokan pangan global dan menyebabkan kenaikan harga pangan hingga hampir 30%. Kenaikan harga pangan tersebut juga memberikan dampak terhadap perekonomian ASEAN. Pada 2023, ASEAN mengalami

[2]Analis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

inflasi harga pangan rata-rata sebesar 15%. Krisis juga diperparah dengan isu lingkungan, perubahan iklim, dan dampak pandemi Covid-19.

Upaya penguatan ketahanan pangan juga menjadi target *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 2, yaitu mencari solusi berkelanjutan untuk mengakhiri kelaparan pada 2030 dan mencapai ketahanan pangan. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat kesenjangan untuk mencapai target SDG 2 semakin melebar. Konflik, pandemi, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan yang terus meningkat akan menggerogoti ketahanan pangan di dunia. FAO merekomendasaikan pemerintah harus mulai memikirkan kembali bagaimana mereka dapat merealokasi anggaran publik lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan makanan sehat, secara berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Global tahun 2022, ketahanan pangan kawasan ASEAN berada pada level 61,8 dan dibawah indeks ketahanan pangan global sebesar 62,2. Penilaian tersebut menggunakan empat indikator pengukuran, yaitu keterjangkauan harga pangan, ketersediaan pasokan, kualitas dan keamanan nutrisi, serta keberlanjutan dan adaptasi. Singapura menduduki peringkat teratas dalam hal ketahanan pangan di Asia Tenggara sebesar 73,1. Sementara Indonesia menempati peringkat ke-4 di ASEAN dengan skor indeks sebesar 60,2.

Secara umum, ASEAN memiliki skor eksposur pangan yang baik (1,31) dalam hal kerentanan terhadap krisis dibandingkan dengan kawasan lain (World Bank, 2023). Namun, masih ada risiko yang harus dikelola oleh kawasan ketika krisis yang tidak terduga terjadi di masa depan.

Grafik 1. Indeks Ketahanan Pangan ASEAN 2022

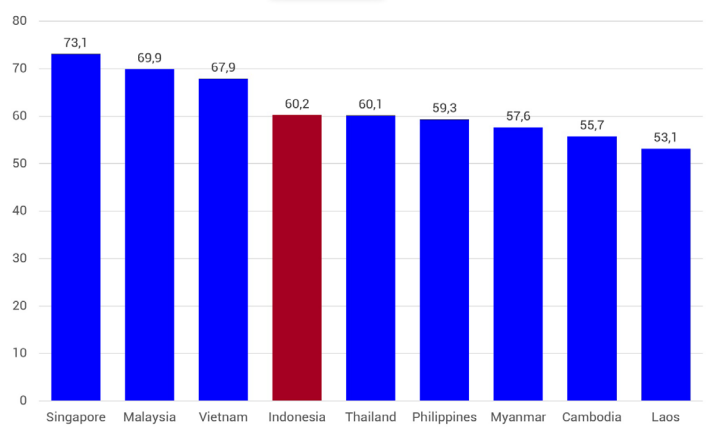

Sumber: GFSI Food Security Index, 2022

Indeks Harga Konsumen (IHK), sebagai salah satu indikator makro utama, juga menunjukkan urgensi yang sama. Bank Dunia mencatat bahwa harga komoditas pangan menunjukan tingkat yang cukup tinggi pada periode Januari 2020 hingga Mei 2022. Distorsi harga komoditas pangan mempengaruhi IHK dan meningkatkan inflasi di negara-negara kawasan termasuk ASEAN. Di sisi lain, kondisi geografis ASEAN menyebabkan frekuensi bencana alam yang cukup tinggi. Untuk itu diperlukan pemahaman bersama mengenai bagaimana meningkatkan ketahanan kawasan, terutama dalam hal ketersediaan dan keterjangkauan pangan ketika bencana datang.

Dengan berbagai latar belakang tersebut, Para Pemimpin ASEAN menaruh perhatian yang besar terhadap permasalahan ketahanan pangan di kawasan. Pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Mei 2023, ASEAN berkomitmen untuk membangun ketahanan dan keberlanjutan jangka panjang dari sistem pertanian dan pangan. Para Pemimpin ASEAN menegaskan kembali komitmen untuk menyinergikan tindakan regional dalam menangani isu-isu lintas sektoral untuk respons yang cepat terhadap ketahanan pangan dan gizi pada saat krisis.

Pengesahan Deklarasi Penguatan Ketahanan Pangan

oleh Para Pemimpin ASEAN menjadi momentum bagi ASEAN untuk memperkuat ketahanan pangan di kawasan pascakrisis. Deklarasi tersebut menitikberatkan pada dua strategi penanganan krisis pangan, yaitu aksi cepat ASEAN dalam menghadapi krisis pangan dan gizi, serta meningkatkan kesiapsiagaan ASEAN dalam mengantisipasi krisis pangan di masa datang melalui penguatan ketangguhan (*resilience*) dan keberlanjutan (*sustainability*) sistem pertanian dan pangan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kolaborasi antara ASEAN dengan berbagai *stakeholders* dalam memperkuat ketahanan pangan kawasan menjadi sangat penting. Deklarasi yang telah disepakati diharapkan memberi dorongan strategis bagi *stakeholders* untuk membangun mekanisme penguatan ketahanan pangan, penguatan rantai pasok regional, penekanan pertanian yang berkelanjutan, dan upaya memastikan ketahanan pangan dalam menghadapi krisis pangan regional.

Sebagai bentuk implementasi, inisiatif kolaborasi antara badan sektoral ASEAN sangat diperlukan. Kolaborasi yang telah dimulai antara sektor Keuangan dan Pertanian ASEAN menjadi sangat relevan. Kolaborasi ini dapat diimplementasikan melalui beberapa tahap, seperti mengumpulkan kebijakan dan praktik terbaik yang ada dan merumuskan kebijakan, rekomendasi, atau pedoman tentang ketahanan dan sistem pangan berkelanjutan. Sangat penting untuk menghubungkan dan membangun mekanisme dukungan Proses Menteri Keuangan untuk berkontribusi pada isu ketahanan pangan tidak hanya dalam konteks global, tetapi dalam kerja sama kawasan ASEAN.

Dukungan Sektor Keuangan ASEAN

Pada 2023, Indonesia sebagai Ketua ASEAN menginisiasi bagaimana sektor keuangan ASEAN mendukung penguatan ketahanan pangan di kawasan. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada pertemuannya di Bali tanggal 31 Maret 2023 menyambut baik inisiatif tersebut, termasuk kolaborasi dengan badan-badan sektoral terkait. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan Indonesia melakukan serangkaian diskusi dengan Kementerian Pertanian dan beberapa Organisasi Internasional untuk mengimplementasikan inisiatif tersebut. Beberapa rangkaian diskusi yang dilakukan telah menghasilkan pemahaman yang sama tentang urgensi kolaborasi antara proses keuangan dan pertanian yang juga menjadi mandat dari Deklarasi KTT. Indonesia mengusulkan tiga bentuk kolaborasi yang dapat didukung oleh sektor keuangan ASEAN untuk penguatan ketahanan pangan di kawasan.

a. Memperbaiki Kebijakan untuk Mengurangi Tantangan Ketahanan Pangan

Kebijakan pemerintah yang mendukung produksi dan perdagangan pertanian, perikanan dan produk pangan, memainkan peran penting dalam memastikan ketahanan pangan dan keberlanjutan produksi pangan. Dampak kebijakan tersebut terhadap ketahanan pangan, yang didefinisikan sebagai ketersediaan, aksesibilitas, dan penggunaan pangan, dapat menjadi signifikan tergantung pada konteks domestik. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya memengaruhi ketahanan pangan di dalam negeri, tetapi juga dapat memberikan dampak yang meluas ke negara-negara lain, termasuk ketahanan pangan di tingkat regional dan global. Oleh karena itu, meningkatkan transparansi kebijakan yang berimplikasi pada ketahanan pangan menjadi sangat penting untuk lebih memahami dampaknya, mengurangi ketidakpastian pasar, menyesuaikan reformasi dengan situasi dan kebutuhan yang terus berubah - terutama pada saat krisis, dan meningkatkan kerja sama regional untuk mengurangi risiko ketahanan pangan.

ASEAN memiliki kepentingan untuk mendorong transparansi

kebijakan yang berimplikasi pada ketahanan pangan di seluruh anggotanya. Mempromosikan transparansi kebijakan yang berimplikasi pada ketahanan pangan di seluruh negara anggota dapat dilakukan dengan cara yang menginformasikan pembuatan kebijakan domestik dan regional serta memungkinkan kawasan ini untuk berkontribusi pada proses transparansi kebijakan di tingkat global. Hal tersebut sangat penting untuk mengurangi *gap* informasi dari kebijakan relevan yang berpotensi memberikan dampak terhadap agenda ketahanan pangan di kawasan ASEAN.

b. Dukungan Kebijakan Fiskal untuk Meningkatkan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Sehat

Dukungan anggaran pemerintah untuk sektor pangan dan pertanian per tahun secara global cukup besar. FAO mencatat bahwa dukungan pemerintah untuk pangan dan pertanian mencapai hampir USD 630 miliar per tahun secara global dari tahun 2013-2018. Dukungan tersebut ditargetkan untuk petani secara individu, melalui kebijakan perdagangan dan pasar serta subsidi fiskal. Namun, ketidakpastian global membuat banyak negara mengalami kesulitan untuk meningkatkan anggaran dan berinvestasi lebih banyak di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Pemerintah perlu memikirkan kembali bagaimana merealokasi anggaran publik agar lebih hemat dan efisien dalam mengurangi biaya makanan bergizi serta meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan makanan sehat, dengan keberlanjutan dan inklusi. Kebijakan pengenaan pajak atas makanan dan minuman padat energi dan tinggi lemak, gula dan/atau garam di banyak negara menunjukkan bukti yang jelas tentang bagaimana kebijakan tersebut memberikan disinsentif bagi masyarakat untuk membeli makanan tersebut dan berkontribusi pada pergeseran permintaan ke arah makanan yang lebih sehat dan bergizi.

c. Meningkatkan Akses Keuangan bagi UMKM dan Petani Kecil untuk Mendukung Ketahanan Pangan

Meningkatkan akses keuangan bagi UMKM dan petani kecil merupakan hal yang krusial dalam mendukung ketahanan pangan. UMKM dan petani kecil memainkan peran penting dalam rantai pasokan pangan global, dan keberhasilan mereka secara langsung berdampak pada produksi, distribusi, dan keterjangkauan pangan. Beberapa strategi dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses keuangan bagi UMKM dan petani kecil guna mendukung ketahanan pangan. Pertama, pemerintah dapat mendorong inklusi keuangan dengan memperluas akses ke layanan keuangan formal seperti rekening tabungan, kredit, asuransi, dan sistem pembayaran digital. Kedua, mengembangkan fasilitas kredit khusus atau program pinjaman yang dirancang untuk UMKM dan petani kecil. Ketiga, menyediakan produk asuransi yang disesuaikan dengan risiko unik yang dihadapi oleh UMKM dan petani kecil, seperti asuransi tanaman, asuransi berbasis cuaca, dan asuransi ternak. Keempat, mempromosikan penggunaan layanan keuangan digital, termasuk *mobile banking* dan dompet digital, untuk menjangkau UMKM dan petani kecil di daerah terpencil.

ASEAN telah mengadopsi Kerangka Kerja untuk mendukung produsen kecil pangan, pertanian, dan kehutanan, koperasi, dan UMKM dalam meningkatkan kualitas produk guna memenuhi standar regional/

internasional dan memastikan daya saing. Kerangka Kerja tersebut memberikan rekomendasi untuk merumuskan kebijakan dan peraturan dalam mengelola dan mempromosikan produsen kecil, koperasi, dan UMKM, serta meningkatkan daya saing untuk memenuhi standar pasar regional dan global. Di sisi lain, Proses Keuangan ASEAN juga memiliki mandat untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan dengan membentuk komite kerja inklusi keuangan pada 2015. Gagasan di balik mandat ini adalah akses bagi UMKM dan keluarga miskin ke layanan keuangan modern. Mekanisme dukungan keuangan yang inovatif bagi UMKM dan petani kecil akan menjadi kolaborasi potensial dengan sektor pertanian untuk mendukung salah satu prioritas strategis Kerangka Kerja ASEAN dalam hal akses keuangan bagi UMKM.

Ketiga proposal Indonesia terkait kontribusi sektor keuangan untuk mendukung penguatan ketahanan pangan di kawasan dapat diterima oleh seluruh anggota ASEAN. Pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Jakarta tanggal 25 Agustus 2023, Para Menteri dan Gubernur Bank Sentral ASEAN sepakat mengakui pentingnya dukungan sektor keuangan untuk memastikan ketahanan pangan regional dan global. Pertemuan mendukung kolaborasi lintas sektoral lintas sektoral di bawah Proses Keuangan ASEAN untuk mengkaji kontribusi sektor keuangan. Bentuk nyata implementasi dari proposal Indonesia tersebut menjadi pekerjaan rumah sektor keuangan ASEAN ke depan dalam berkolaborasi dengan sektor pertanian. Semoga Keketuaan Laos tahun 2024 dapat meneruskan inisiatif yang telah dimulai oleh Indonesia.

ASEAN *Forum on Taxation* sebagai Wadah Koordinasi Implementasi Pilar Dua Negara ASEAN

Melani Dewi Astuti[3] dan Pungki Yunita Chandrasari[4]

Latar Belakang

Negara-negara ASEAN kembali bertemu dalam ASEAN *Forum on Taxation* (AFT) ke -17 yang diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 3 Agustus 2023 di Yogyakarta. AFT dibentuk pada tahun 2010 untuk mengatasi tantangan terkait pajak dan kebijakan integrasi ekonomi regional, serta untuk mendukung dialog regional terkait masalah perpajakan untuk integrasi regional.

Pada penyelenggaraan AFT tersebut, terdapat sesi diskusi dan *sharing* pengalaman mengenai isu perpajakan terkini. Para ahli dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan *Asian Development Bank* (ADB) dihadirkan khusus untuk menjelaskan perkembangan penerapan Pilar Dua. AFT juga menjadi wadah bagi negara-negara ASEAN untuk berbagi pengalaman dalam upaya antisipasi penerapan Pilar Dua.

Two-Pillar Solution

Dalam rangka mengatasi tantangan pemajakan akibat digitalisasi ekonomi, OECD mengusulkan *Two-Pillar solution*. Sejak November 2021, tercatat 137 negara anggota OECD/G20 BEPS *Inclusive Framework* (BEPS IF), yang mewakili lebih dari 90 persen produk domestik bruto (PDB) global, termasuk Indonesia, telah menyetujui *Two-Pillar Solution*. Negara ASEAN yang tergabung dalam BEPS IF tersebut

[3]Analis Kebijakan Ahli muda pada Badan Kebijakan Fiskal
[4]Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Brunei Darussalam, sedangkan empat negara ASEAN lainnya yaitu Myanmar, Filipina, Laos, dan Kamboja belum tergabung dalam forum tersebut.

Two-Pillar Solution terdiri dari Pilar Satu dan Pilar Dua. Pilar Satu bertujuan untuk memberikan distribusi laba yang lebih adil dengan merealokasi hak pemajakan kepada negara pasar melalui *nexus* dan alokasi laba baru. Berdasarkan ketentuan saat ini, negara pasar hanya dapat mengenakan pajak atas laba pelaku usaha luar negeri jika terdapat kehadiran fisik di negara pasar, contohnya: melalui adanya: kantor, agen penjualan, atau cabang. Namun, dengan adanya nexus baru, yaitu adanya penjualan di negara pasar minimum 1 juta euro, maka negara pasar mendapatkan hak pemajakan meskipun tidak terdapat kehadiran fisik di negara pasar. Sementara itu, metode alokasi laba baru adalah alokasi laba berdasarkan pendekatan berbasis formula, yang disebut *Amount* A. Alokasi laba berdasar *Amount* A artinya, negara pasar akan mendapatkan 25% dari porsi laba non-rutin yang dialokasikan berdasarkan proporsi penjualan lokal terhadap penjualan total. Pilar Satu akan diimplementasikan melalui suatu konvensi multilateral yang harus ditandatangani negara-negara BEPS IF. Pilar Dua memperkenalkan tarif pajak efektif minimum pada level global sebesar 15% untuk memastikan *level playing field* antar negara dalam menarik investasi (*foreign direct investment*). Pilar Dua juga bertujuan untuk mencegah *harmful tax practices* yang dapat menggerus basis pemajakan dan penggeseran laba ke negara-negara dengan tarif pajak yang rendah.

Pilar Dua terdiri dari *GloBE Rules* dan *Subject to Tax Rule* (STTR). *GloBE Rules* terdiri dari *Income Inclusion Rules* (IIR) dan *Undertaxed Payment Rules* (UTPR). Ketentuan IIR mengharuskan "induk" dari suatu Grup *Multinational Entities* (MNEs) atau bagian dari Grup MNEs untuk membayar pajak tambahan (*top-up tax*) atas bagian tertentu dari penghasilan anak usaha/ bentuk usaha tetap di negara lainnya, yang pajak efektifnya kurang dari 15%. Sementara itu, UTPR memberikan hak kepada negara domisili anak usaha/Bentuk Usaha Tetap untuk mengenakan *top-up tax* melalui pembatalan pembebanan biaya. UTPR hanya berlaku dalam hal ketentuan IIR tidak dapat diterapkan.

Selain itu, pengenaan *top-up tax* dapat juga dilakukan melalui penerapan *Qualified Domestic Minimum Top-Up tax* (QDMTT) dengan nilai *top-up tax* sama dengan IIR *top-up tax*. Bedanya, jika IIR *top-up tax* dikenakan oleh negara domisili induk kepada induk usaha di negaranya, QDMTT dikenakan oleh negara sumber kepada anak usaha atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). Pengenaan QDMTT oleh negara sumber akan mengurangi *top-up tax* sehingga negara domisili induk tidak lagi bisa mengenakan *top-up tax* berdasarkan IIR.

Negara-negara yang tergabung dalam BEPS IF tersebut telah menyepakati bahwa *GloBE Rules* bersifat *common approach* yang artinya tidak bersifat wajib, namun jika negara/ yurisdiksi memilih untuk menerapkan *GloBE Rules* harus menerapkannya secara konsisten dan selaras dengan *Pilar Two Agreement* yang tertuang dalam *GloBE Model Rules* dan *commentary*. Jika suatu negara tidak menerapkan Pilar Dua, maka negara/yurisdiksi tersebut harus menerima penerapan *GloBE Rules* oleh negara lainnya untuk MNEs yang beroperasi di negara tersebut.

Implementasi Pilar Dua di Negara-Negara ASEAN

Indonesia berkomitmen untuk menerapkan Pilar Dua dalam sistem perpajakan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022).

Dalam Pasal 52 PP 55/2022 tersebut disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melaksanakan

ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan otoritas negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mengatasi tantangan pemajakan akibat dari digitalisasi ekonomi dan/atau penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba lainnya.

PP 55/2022 tersebut menjadi dasar untuk memasukkan unsur Pilar Satu dan Pilar Dua, khususnya Pilar Dua karena grup MNEs yang masuk dalam cakupan perjanjian pajak internasional akan dikenakan pajak minimum global yang terutang di Indonesia berdasarkan perjanjian tersebut. Namun demikian, untuk menerapkan Pilar Dua diperlukan Peraturan Menteri Keuangan untuk mengadopsi ketentuan *GloBE Rules* sebagaimana dimuat dalam *GloBE Model Rules*. Mengingat Pilar Dua harus diterapkan secara seragam dan terkoordinasi dalam penerapannya, tiap-tiap negara harus mendasarkan peraturan yang dibuatnya pada *GloBE Model Rules*.

Sesuai linimasa global implementasi GloBE *rules* yang dimulai Tahun 2024, Indonesia berencana akan menerapkan *GloBE Rules* dan QDMTT melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan. Selain penerbitan peraturan, penyiapan sumber daya dan sistem administrasi harus dilakukan untuk dapat melaksanakan Pilar Dua. Analisis terkait insentif pajak saat ini sedang dilakukan untuk mengidentifikasi dampak Pilar Dua terhadap insentif pajak dan merumuskan desain insentif pajak untuk menyesuaikan dengan Pilar Dua.

Sementara itu, berbagai negara di kawasan ASEAN tengah mendesain kebijakan dan sistem administrasi perpajakan untuk mendukung penerapan terkait sejumlah norma dalam Pilar Dua. Thailand pada 7 Maret 2023 telah menyetujui secara prinsip untuk menerapkan *GloBE Rules* mulai Tahun 2025. Otoritas Pajak Thailand sedang dalam proses untuk menyusun peraturan yang ditargetkan untuk selesai pada tahun 2023 dan berlaku efektif pada tahun 2025. *The Board of Investment of Thailan*d (BOI) diberikan wewenang untuk menyediakan *cash grants* untuk *qualified investor*. MNEs yang terdampak Pilar Dua disarankan untuk mulai memperhitungkan dampak dari penerapan Pilar Dua dan mempertimbangkan linimasa yang sudah disetujui dalam mengevaluasi keputusan investasinya.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BOI Thailand, proyek yang diterima oleh BOI sejak Januari s.d. September 2020 sebanyak 1.037 proyek dan total nilai investasi yang diterima oleh BOI pada periode tersebut sebesar 216,64 Miliar THB. Thailand juga telah mengambil langkah mitigasi dampak pajak minimum global, dengan menyesuaikan fasilitas *tax holiday*, yaitu dari yang semula pengecualian Pajak Penghasilan Badan 100%, dikurangi menjadi hanya 50% namun diberikan perpanjangan waktu 2 (dua) kali lipat dari masa insentif tersisa. Hal ini dilakukan untuk menaikkan pajak efektif (*effective tax rate*/ETR) Wajib Pajak, yang pada akhirnya dapat memperkecil pengenaan *top-up tax* oleh negara domisili induk.

Singapura juga telah mengumumkan akan menerapkan *GloBE Rules* dan *domestic top-up tax* bagi MNEs dengan omset tahunan diatas EUR 750 juta yang beroperasi di Singapura pada atau setelah 1 Januari 2025. Singapura akan memperkenalkan *non-fiscal incentives* seperti subsidi, hibah atau *land discounts,* serta berencana untuk memperkenalkan *Qualified Refundable Tax Credit* (QRTC) untuk menjaga iklim investasi tetap menarik.

Selain itu, Vietnam telah mengumumkan akan melakukan finalisasi dan memasukkan dua resolusi, yaitu terkait Pilar Dua dan perubahan terhadap desain insentif mereka. Dalam hal ini, Vietnam menyatakan bahwa karena beberapa negara berencana untuk menerapkan Pilar Dua pada tahun 2024, Vietnam juga akan melakukan hal yang sama (*early adoption*). Vietnam juga berencana untuk memperkenalkan bentuk insentif pajak yang baru agar selaras dengan Pilar Dua dan memastikan *competitiveness*

dan *attractiveness* iklim investasi di Vietnam. Vietnam akan menerapkan IIR dan QDMTT pada 2024.

Tak kalah dengan negara ASEAN lainnya, Kementerian Keuangan Malaysia telah mempublikasikan *Public Consultation Paper* yang berjudul "*the Implementation of GloBE Rules in Malaysia*." *Paper* tersebut mengundang sektor privat termasuk *tax expert* untuk memberikan *feedback* pada 15 Agustus 2022. Pembahasan berfokus pada linimasa, legislasi, biaya kepatuhan, dan juga rencana penerapan QDMTT. Malaysia berencana untuk menerapkan Pilar Dua pada tahun 2024. Saat ini Malaysia sedang melakukan *review* terkait detil teknis untuk menerapkan *GloBE Rules* termasuk kemungkinan untuk memperkenalkan QDMTT.

Di sisi lain, Brunei Darussalam selaku negara yang sudah tergabung dalam BEPS IF belum memberikan informasi terkait penerapan Pilar Dua. Empat negara ASEAN lainnya yang belum tergabung dalam BEPS IF yaitu Filipina, Laos, Myanmar, dan Kamboja belum menyatakan intensinya untuk menerapkan Pilar Dua. Namun demikian, meskipun terdapat beberapa negara ASEAN yang bukan anggota BEPS IF, jika negara domisili dari investor negara dimaksud menerapkan *GloBE Rules*, negara-negara tersebut akan tetap terdampak. Negara domisili induk tetap dapat mengenakan *top-up tax* terkait anak usahanya di negara-negara non-IF yang mempunyai pajak efektif kurang dari 15%.

Peran AFT pada Implementasi Pilar Dua di Negara-Negara ASEAN

AFT terbukti telah menjadi wadah bagi negara-negara ASEAN untuk saling berbagi pengalaman dan saling mendukung agar penerapan Pilar Dua dapat dilakukan dengan baik. AFT dapat mendorong keikutsertaan negara-negara ASEAN dalam penerapan Pilar Dua, tidak terbatas pada negara ASEAN anggota IF namun juga negara ASEAN yang bukan anggota IF. Hal ini sangat penting dilakukan agar negara-negara ASEAN lain yang belum mendapatkan informasi yang memadai terkait Pilar Dua, dapat saling belajar dan mempertimbangkan untuk ikut menerapkan Pilar Dua.

Selain itu, AFT dapat menjadi wadah dalam memperkuat kerja sama, khususnya dalam pertukaran informasi terkait implementasi Pilar 2. Hal ini dikarenakan, dalam penerapan Pilar 2 dibutuhkan koordinasi dan pertukaran informasi antar negara.

AFT telah menghadirkan *tax expert* yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan negara-negara ASEAN dan pada akhirnya dapat memberikan pemahaman yang komprehensif. Kekhawatiran atas kesalahan dalam proses implementasi pun dapat dimitigasi. Seluruh upaya tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat bagi negara-negara ASEAN.

Dengan penyelenggaraan AFT ini, Indonesia telah memimpin upaya ASEAN untuk menjadi "*Epicentrum of Growth*" melalui kerja sama di bidang perpajakan. Kepemimpinan Indonesia dalam AFT tersebut mendapatkan apresiasi dari seluruh negara ASEAN. Hal terpenting yang perlu dipertahankan adalah diskusi terkait implementasi Pilar Dua dan kerja sama di bidang perpajakan lainnya perlu untuk terus dilakukan. Dengan cara tersebut lah, komunitas ASEAN dapat mencapai kemandirian dari segi perpajakan.

Masa Depan Pembiayaan Infrastruktur di Kawasan ASEAN

Adishta Librata Wijayanto[5]

Perkembangan Infrastruktur

Pembiayaan infrastruktur merupakan instrumen penting bagi Indonesia untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi ke depan. Sebagai negara berkembang, infrastruktur Indonesia masih mengalami banyak ketertinggalan dari negara lain. Hal inilah yang kemudian juga berdampak pada daya saing ekonomi Indonesia di dunia internasional.

Pada akhir Agustus 2023, Presiden Indonesia mengapresiasi posisi Indonesia yang naik 10 peringkat dari ke-44 menjadi ke-34 sebagai negara paling kompetitif berdasarkan IMD *Global Competitiveness Index* tahun 2023. Tingkat kompetitif suatu negara diukur berdasarkan 4 aspek besar, yaitu kinerja ekonomi, efisiensi kepemerintahan, efisiensi bisnis dan infrastruktur. Pada bagian infrastruktur, IMD secara terperinci menilai 5 jenis kriteria, yaitu infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi, infrastruktur *scientific*, infrastruktur kesehatan dan lingkungan, serta infrastruktur pendidikan.

Secara umum, infrastruktur Indonesia mendapat peringkat 51 dari 64 negara, atau masuk golongan terbawah. Hal ini tentu saja bukan

[5]Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal

berita yang menggembirakan, mengingat dalam 10 tahun terakhir Indonesia secara masif melakukan ekspansi pembangunan infrastruktur. Beberapa negara ASEAN 5, masih memiliki peringkat yang lebih baik dan konsisten selama 5 tahun terakhir. Singapura menempati peringkat tertinggi yaitu 9, diikuti oleh Malaysia peringkat 35, Thailand peringkat 43 dan hanya Filipina yang berada di bawah Indonesia dengan peringkat ke 58. Sementara itu 5 negara ASEAN lainnya tidak masuk dalam pengukuran yang dilakukan oleh IMD.

Pembangunan infrastruktur merupakan *necessary instrument* guna meningkatkan keterkaitan antar aktivitas ekonomi pada setiap wilayah di Indonesia. Infrastruktur yang baik dapat memciptakan aktivitas ekonomi baru dan juga meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi sebelumnya, yang secara keseluruhan akan meningkatkan aktivitas ekonomi. Selain aktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur juga mendorong akumulasi pengetahuan dan transfer teknologi yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Mengingat pentingnya peran infrastruktur, Indonesia yang merupakan perekonomian terbesar di ASEAN mempunyai kesadaran untuk mendorong pembangunan infrastruktur dengan membentuk lembaga pembiayaan infrastruktur pada kawasan ASEAN. Secara umum, negara-negara berkembang di ASEAN sebelumnya banyak mendapat pembiayaan infrastruktur dari berbagai institusi keuangan internasional, terutama berasal dari lembaga keuangan multilateral seperti Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia (WB).

Untuk meningkatkan pembiayaan infrastruktur dibutuhkan sumber pendanaan yang besar. Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan diversifikasi pembiayaan infrastruktur dengan risiko yang terkendali. Hal ini didasarkan pada karakteristik negara berkembang di ASEAN yang secara umum memiliki masalah *saving investment gap*, dimana kebutuhan investasi seperti infrastruktur jauh lebih besar dari ketersediaan tabungan. Dengan demikian, negara berkembang di ASEAN mengandalkan aliran dana luar negeri untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan infrastruktur.

Pendirian ASEAN Infrastructure Fund (AIF)

Pada tahun 2011, Indonesia bersama Malaysia menginisiasi pendirian ASEAN Infrastructure Fund (AIF) yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di ASEAN dan memobilisasi dana cadangan devisa di Kawasan. Pada tahun 2012 AIF berdiri di bawah Labuan Act Malaysia dengan modal awal USD485 juta. Dengan kemampuan dan pengalaman yang terbatas, Indonesia bersama negara ASAEN lainnya membutuhkan mitra internasional, dalam hal ini menggandeng Bank Pembangunan Asia (ADB) sebagai mitra dan sekaligus sebagai administrator dari ASEAN Infrastructure Fund (AIF). Secara rinci, modal AIF banyak berasal dari ADB dan Malaysia yang berkontribusi sebesar USD150 juta yang kemudian diikuti oleh Indonesia sebesar USD 120 juta. Sementara itu kontribusi negara ASEAN lainnya jauh lebih rendah, terlebih lagi negara *least developed countries* (LDC), yaitu Kamboja, Laos, dan Myanmar yang masing-masing hanya berkontribusi sebesar USD100 ribu.

Pada tahap awal pembiayaan, pendanaan infrastruktur hanya didominasi oleh dana ADB dan modal AIF. Pada tahap ini, biaya bunga yang ditawarkan oleh AIF lebih tinggi dibandingkan *cofinancing* ADB. Dengan demikian, banyak negara yang lebih memilih untuk meminjam ADB secara langsung. Tercatat sekitar 80% pinjaman dari tahun 2013-2018 didominasi oleh pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Pada tahap berikutnya, pengembangan krusial terjadi sejak 2018 dimana Indonesia mengarahkan AIF untuk mengembangkan pasar pembiayaan infrastruktur hijau.

Pengembangan Kapasitas AIF.

Melalui *platform ASEAN Catalytic Green Finance* (ACGF), AIF mengembangkan potensi pembiayaan infrastuktur hijau. Sejalan dengan komitmen internasional untuk menurunkan emisi karbon, pendirian institusi keuangan hijau dan akumulasi pengumpulan dana untuk infrastruktur hijau meningkat pesat. Peristiwa ini dimanfaatkan dengan baik oleh AIF, dengan meningkatkan jumlah mitra ACGF untuk meningkatkan pembiayaan infrastruktur hijau di kawasan hijau. Pada tahun 2023, setidaknya AIF telah mendapatkan 8 mitra tambahan, yaitu AFD Perancis, CDP Italia, EDCF Korea Selatan, Uni Eropa, European Investment Bank, Green Climate Fund, KFW Jerman dan FCDO United Kingdom. Komitmen pendanaan infrastruktur dari mitra AIF tersebut mencapai USD 1,9 miliar. Perkembangan ini sangat penting, mengingat mitra AIF tidak hanya memberikan pendanaan yang murah melainkan juga memberikan hibah pada tahap persiapan proyek.

Untuk dapat merealisasikan komitmen mitra AIF, Indonesia yang pada tahun 2023 yang merupakan *Chairman* dari AIF dan ASEAN merumuskan langkah penting pengembangan AIF melalui reposisi dan rekapitalisasi. Pada awal tahun 2023, modal AIF yang tersedia untuk pembiayaan hanya sebesar USD 33,4 juta dan hanya sekitar USD12,6 juta yang dapat dimanfaatkan untuk *plarform* ACGF. Sementara itu, untuk dapat merealisasikan komitmen mitra AIF sebesar USD 1,9 miliar, setidaknya diperlukan USD 190 juta modal AIF. Dengan demikian, diperlukan tambahan modal (rekapitalisasi) secara bertahap untuk dapat menangkap komitmen tersebut.

Untuk tahap awal, jumlah proyek yang telah masuk daftar *pipeline* pembiayaan AIF tahun 2023-2025 telah mencapai USD 1 miliar. Hal ini mengindikasi tambahan kebutuhan modal AIF sebesar USD100 juta. Selain melalui upaya rekapitalisasi, reposisi AIF diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap komitmen AIF untuk mengembangkan pembiayaan infrastruktur hijau. Saat ini, portofolio pembiayaan hijau AIF telah mencapai 18% akan ditingkatkan menjadi 30% sampai tahun 2026 dan sekitar 70% pada tahun 2030. Dengan semakin meningkatnya portofolio hijau AIF, diharapkan dapat menarik mitra keuangan hijau baru dan peningkatan komitmen dari mitra AIF.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai pendekatan kepada negara ASEAN pada forum keuangan ASEAN. Mengenai reposisi AIF dengan meningkatkan portofolio hijau, secara umum negara-negara ASEAN dapat menyetujui. Namun demikian, negara perekonomian kecil memberikan catatan untuk dapat menyisakan pembiayaan untuk infrastruktur non hijau. Hal ini terkait tantangan yang dihadapi negara tersebut dalam bertransformasi untuk mendesain proyek infrastruktur hijau yang sesuai dengan kriteria *platform* AIF.

Tantangan terbesar berasal dari rekapitalisasi AIF, mengingat banyak perekonomian di negara ASEAN yang belum pulih dari dampak pandemi COVID-19, bahkan ada yang masih mengalami *financial distress.* Dalam hal ini, AIF yang menggunakan mata uang USD sebagai basis operasi dan pembiayaan masih menyisakan risiko nilai tukar akibat depresiasi nilai tukar dari mata uang negara ASEAN. Terlebih lagi, saat ini Amerika Serikat masih menerapkan suku bunga tinggi dalam rangka menekan tingkat inflasi. Kebijakan pengetatan moneter oleh The Federal Reserve Amerika Serikat secara langsung mengakibatkan mata uang USD.

Dalam pandangan penulis, banyak opsi rekapitalisasi yang dapat di analisa lebih lanjut. Pembukaan kepemilikan AIF oleh negara lain dan institusi keuangan internasional merupakan salah satu pilihan rasional. Opsi pembukaan kepemilikan negara di luar ASEAN dalam jangka pendek sangat bermanfaat

dalam menyerap komitmen mitra AIF. Namun demikian, dalam jangka menengah dan panjang mempunyai konsekuensi intervensi selain peningkatan biaya bunga akibat kemungkinan pemintaan kenaikan imbal hasil modal dari AIF. Opsi pembukaan kepemilikan modal ASEAN akan jauh lebih menarik jika dapat diberikan kepada lembanga keuangan internasional seperti *multilateral development bank* (MDB), terlebih yang mempunyai akses kepada dana hijau yang lebih besar dan kompetitif. Untuk mewujudkan hal ini, AIF perlu memodifikasii *shareholder agreement* untuk dapat memberikan daya tarik yang lebih besar berupa peran *lead cofinancing.*

Selain reposisi dan rekapitalisasi, agenda penting yang perlu di kawal Indonesia adalah pengembangan taksonomi hijau yang dilakukan secara bertahap. Taksonomi hijau diarahkan untuk dapat menjadi standar pada pembiayaan infrastruktur hijau di ASEAN dan dapat diadopsi oleh AIF yang saat ini masih banyak mengadopsi sistem ADB, yang merupakan administrator AIF.

Terlepas dari upaya pengembangan kapasistas AIF sebagai lembaga pembiayaan milik ASEAN dalam menunjang pembangunan infrastruktur, pembiayaan infrastruktur pada saat ini sangat strategis. Penulis menilai suku bunga Amerika Serikat saat ini sudah mencapai puncak dan kemungkinan besar akan menuju tren penurunan dalam jangka pendek seiring dengan penurunan inflasi. Hal ini akan memberikan keuntungan pada pinjaman dalam mata uang USD. Pertama, penurunan suku bunga Amerika Serikat akan berdampak langsung pada penurunan suku bunga *Secured Overnight Financing Rate* (SOFR) yang digunakan dalam skema AIF. Kedua, penurunan suku bunga akan berdampak pelemahan mata uang USD terhadap mata uang negara-negara ASEAN.

Inisiatif Penanggulangan Bencana di Kawasan ASEAN

Rita HelbraTenrini[6]

Negara di Kawasan Asia Tenggara memiliki risiko bencana yang sangat tinggi karena dilalui oleh cincin api pasifik. Berdasarkan World Risk Report 2022 Indonesia dan 3 negara ASEAN lainnya yaitu Filipina, Myanmar dan Vietnam masuk dalam 15 negara dengan risiko bencana tertinggi. Bahkan Indonesia menempati posisi ke-3 negara dengan risiko bencana tertinggi di bawah Filipina dan India. Hal ini menjadi alasan urgensi pembahasan mengenai penanggulangan bencana di kawasan ASEAN.

ASEAN terdiri dari 10 negara anggota: Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos (PDR), Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Berdasarkan ASEAN Disaster Information Network (ADINet) dalam setahun terakhir di wilayah ASEAN terjadi 1039 kejadian bencana, dengan jumlah kematian akibat bencana sebesar 624 orang, sementara

[6]Analis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

yang terdampak lebih dari 23 juta orang, rumah rusak lebih dari 1,2 juta unit dan menyebabkan kerugian sebesar kurang lebih USD 600 juta. Wilayah ASEAN tidak hanya menghadapi bencana yang terjadi secara tiba-tiba, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir bandang, namun juga bencana yang terjadi secara perlahan, seperti kekeringan, degradasi lahan dan kenaikan permukaan air laut. Perubahan iklim menjadi salah satu penyebab peningkatan frekuensi, intensitas dan tingkat keparahan bencana di wilayah ASEAN.

Secara rutin negara-negara yang tergabung dalam ASEAN melakukan pertemuan dan membahas isu dari berbagai sektor, seperti ekonomi, budaya, penelitian akademisi, dan industri. Negara anggota ASEAN juga mendukung terwujudnya kolaborasi regional dalam melakukan respons yang lebih baik terhadap bencana alam dan bencana akibat ulah manusia serta melakukan mitigasi dampak bencana melalui tindakan yang terkoordinasi.

Kejadian tsunami di Samudera Hindia pada bulan Desember 2004 menyebabkan kerugian dan kerusakan yang signifikan di Asia Tenggara. Meskipun negara-negara di luar kawasan juga terkena dampaknya, akan tetapi kehancuran yang terjadi di Indonesia dan Thailand mendorong negara anggota ASEAN untuk melakukan kegiatan secara kolektif dan membentuk kelembagaan penanggulangan bencana atau *disaster management* (DM). Hal yang dianggap paling penting adalah penyelesaian perundingan untuk merumuskan ASEAN *Agreement on Disaster Management and Emergency Response* (AADMER), yang merupakan landasan hukum bagi DM regional ASEAN. AADMER ditandatangani pada tahun 2005 dan mulai berlaku setelah ratifikasi pada tahun 2009.

Sejak ratifikasi dari AADMER pada tanggal 24 Desember 2009, ASEAN telah meningkatkan kemampuannya dalam mencegah dan merespons bencana di kawasan regional ASEAN. Namun, seiring dengan perubahan lanskap risiko bencana yang semakin kompleks, terdapat urgensi untuk meningkatkan upayanya dalam membangun ketahanan terhadap bencana di kawasan ASEAN.

Deklarasi di Bandar Seri Begawan pada tahun 2021, menghasilkan inisiatif ASEAN *Responses to Emergencies and Disasters* (ASEAN SHIELD) yang menyerukan pendekatan strategis, holistik, lintas sektoral dan terkoordinasi di seluruh komunitas ASEAN. Untuk memastikan terjaganya kesejahteraan di kawasan ASEAN, dibutuhkan respons yang kolektif, cepat, efektif dan tepat waktu dalam memitigasi dampak dari berbagai jenis bencana yang mengancam wilayah ASEAN. Oleh karena itu, pada bulan Juni 2022 ASEAN membentuk ASEAN Disaster Resilience Platform (ADRP). Tujuan utama dibentuknya ADRP adalah untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi di antara badan sektoral ASEAN yang relevan, entitas yang terkait dengan ASEAN, mitra eksternal ASEAN, badan PBB, sektor swasta, atau lembaga non-pemerintah lainnya, organisasi non-ASEAN yang terkait dengan penanggulangan bencana alam. Untuk meningkatkan kapasitas di Kawasan ASEAN agar lebih responsif dan antisipatif terhadap tantangan risiko bencana di masa depan, maka AADMER dijadikan sebagai tulang punggung kebijakan regional dan platform bersama untuk menjaga Sentralitas ASEAN.

ADRP diketuai bersama oleh ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM), ASEAN Senior Officials Meeting (SOM), ASEAN Senior Economic Officials Meeting (SEOM), dan diikuti oleh 12 anggota tetap dari berbagai forum pertemuan ASEAN salah satunya adalah ASEAN Finance Deputies Meeting (AFDM). Pertemuan ADRP ini bertujuan untuk mendorong diskusi antarsektoral mengenai inisiatif-inisiatif yang berkaitan dengan penanggulangan bencana alam di ASEAN, dan merencanakan usulan inisiatif-inisiatif

lintas sektoral bersama, dan mengoordinasikan implementasinya.

Dari sisi pembiayaan, negara anggota ASEAN menyadari pentingnya mengintegrasikan manajemen risiko bencana dalam agenda pembangunan ekonomi untuk meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu maka tiga badan dalam ASEAN yaitu ASEAN *Finance and Central Bank Deputies Meeting* (AFCDM), ASEAN I*nsurance Regulators Meeting* (AIRM), dan ASEAN *Committee of Disaster Management* (ACDM), bersama-sama mengembangkan Peta Jalan ASEAN *Disaster Risk and Financing* (ADRFI) pada tahun 2011.

Pada awal pembentukan peta jalan tersebut, Sekretariat ASEAN melalui the Finance Integration Division (FID) dan Divisi the Disaster Management and Humanitarian Assistance (DMHA) menyelenggarakan *ASEAN Secretariat Cross-Sectoral Coordination Workshop on Disaster Risk Financing and Insurance* pada tanggal 4 Desember 2012 di Jakarta. Selanjutnya pertemuan ASEAN Cross-Sectoral Coordinating Meeting on Disaster Risk Financing and Insurance berlangsung pada tanggal 13 – 14 Februari 2013 di Cebu, Filipina.

Pada bulan April 2013, the ASEAN *Finance Ministers Meeting* (AFMM) membentuk ASEAN Cross-Sectoral Coordination Committee on DRFI (ACSCC-DRFI), yang terdiri dari tiga badan tersebut di atas, untuk dapat melaksanakan Peta Jalan ADRFI.

Dalam *terms of reference* (TOR) disebutkan bahwa tujuan dari pembentukan ACSCC-DRFI adalah (i) memfasilitasi implementasi Peta Jalan ADRFI, (ii) meningkatkan kolaborasi antar badan sektoral terkait dan memastikan efektivitas implementasi Peta Jalan ADRFI, dan (iii) memantau kemajuan inisiatif berdasarkan rencana kerja Program ADRFI. Indonesia berpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan ADRFI dan tahun ini Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Keuangan juga menjadi Ketua dari forum ADRFI.

Peta Jalan ini terdiri dari dua tahap, tahap pertama tahun 2015-2016 telah selesai dengan *output* berupa pembentukan *database* regional mengenai kerusakan dan kerugian untuk lima negara ASEAN yaitu Brunei, Laos, Filipina, Thailand, dan Singapura, studi mengenai pengembangan kebijakan publik nasional dalam DRFI pada negara Filipina dan Thailand, dan beberapa pelatihan/seminar.

Tahap kedua dimulai dari tahun 2019 dan berakhir pada tahun 2023. Pada ADRFI tahap 2 terdapat tiga pilar yang menjadi dasar implementasi dari berbagai inisiatif. Pilar pertama mencakup pengembangan platform ADRFI-2 berupa data dan penilaian risiko di mana negara anggota ASEAN dapat memperoleh informasi mengenai risiko yang timbul dari bencana alam. Platform ini bertujuan untuk membantu negara anggota ASEAN menggunakan data dan alat analitik dalam platform ini untuk menilai aset mereka seperti infrastruktur yang memerlukan perlindungan, mengidentifikasi potensi risiko bagi kota-kota mereka, dan mengembangkan solusi pembiayaan risiko yang bersifat spesifik untuk setiap negara.

Pilar kedua adalah pembentukan komunitas yang tidak hanya terdiri dari negara anggota ASEAN, namun juga organisasi internasional dan mitra industri, untuk memberikan masukan berupa rekomendasi penanggulangan risiko dan membantu merancang instrumen dan solusi transfer risiko yang inovatif.

Pilar ketiga adalah berupa kegiatan peningkatan kapasitas seperti lokakarya atau seminar yang mencakup berbagai topik mulai dari potensi bahaya dan solusi pembiayaan bencana hingga skema asuransi dan peran teknologi. Hal ini dapat membantu negara anggota ASEAN untuk mengadaptasi aspek utama pendanaan dan transfer risiko bencana ke dalam kebijakan dalam negeri mereka.

Pilar pertama dan kedua didukung oleh Institute

of Cathasthrope Risk Management (ICRM) Nanyang Technological University (NTU) di Singapura, pilar ketiga dikelola langsung oleh Sekretariat ASEAN. Platform ADRFI-2 menjadi alat bagi negara anggota ASEAN untuk mengetahui kemampuan manajemen risiko dan transfer risiko yang dapat mereka gunakan untuk memberikan dasar kebijakan bagi pendanaan risiko bencana baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta dalam jangka panjang serta solusi transfer risiko.

Platform ADRFI-2 ini hanya diikuti oleh 5 negara anggota ASEAN lainnya selain Indonesia yaitu Kamboja, Laos, Filipina, Thailand dan Vietnam. Output dari platform ini berupa laporan rekomendasi dari risiko bencana per negara. Laporan rekomendasi untuk Indonesia telah disampaikan oleh ICRM NTU untuk selanjutnya dapat digunakan oleh Indonesia untuk dapat membuat kebijakan terkait pendanaan risiko bencana.

Akan tetapi Platform ADRFI-2 ini hanya untuk tiga jenis bencana yaitu gempa, banjir dan badai tropis, sementara Indonesia memiliki 9 jenis bencana. Apabila platform dapat dilengkapi dengan 9 jenis bencana, maka informasi risiko akibat bencana dapat diperoleh secara utuh. Rekomendasi yang diberikan untuk risiko bencana di Indonesia adalah membuat *pooling* pendanaan untuk risiko bencana (*cat pool*). *Cat pool* ini adalah adalah suatu bentuk asuransi bersama yang dapat memfasilitasi pembagian dari pendanaan yang dikumpulkan dari semua anggota yang berpartisipasi. Pendanaan yang dikumpulkan ini membantu memitigasi jika terdapat anggota yang terkena dampak bencana, sekaligus menyeimbangkan kontribusi dan manfaat dalam jangka panjang. Melalui mekanisme *Cat pool* negara-negara dapat merespons bencana dengan cepat dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat dan penghidupan mereka.

Indonesia telah memiliki mekanisme *Pooling Fund* Bencana (PFB) yang konsepnya berupa pengumpulan dana bersama untuk kebutuhan domestik negara Indonesia dalam penanggulangan bencana. Dana yang terkumpul dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak lain termasuk dari komunitas internasional. Menurut rekomendasi dalam laporan ini apabila pengumpulan dana merupakan inisiatif regional, maka dapat lebih menarik bagi para donor internasional dan lembaga pembiayaan pembangunan global. Hal tersebut telah terjadi di beberapa *cat pool* regional lainnya seperti Pacific Catastrophe Risk Assessment and Financing Initiative (PCRAFI) dapat menarik dukungan pendanaan dari Kanada, Jerman, Inggris dan Amerika.

Perlu dilakukan studi lebih lanjut akan rekomendasi yang diberikan, apakah dengan melakukan *pooling* resiko secara regional akan menurunkan risiko untuk setiap negara khususnya Indonesia, dan mekanisme ini apakah juga dapat memberikan manfaat seperti penurunan premi asuransi. Aksi secara regional dibutuhkan untuk membagi risiko yang ada sehingga didapatkan manfaat yang optimal dari kerjasama regional ASEAN.

Kerja Sama Keuangan ASEAN+3: Sejarah, Perkembangan, dan Capaian Keketuaan Bersama Indonesia-Jepang

Nugraha Adi[7], Ginanjar Wibowo[8], Yudha Perdhana[9], Lilik Suryo Nugrohodjati[10]

Pendahuluan

Kesuksesan Indonesia di forum internasional terus berlanjut. Setelah sukses menjalani Keketuaan G20 di 2022, Indonesia kembali menjadi yang terdepan dalam kepemimpinan internasional, yakni sebagai Ketua ASEAN pada 2023. Dengan mengusung tema "*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*", Indonesia bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk memastikan bahwa ASEAN akan tetap dan semakin penting bagi dunia sebagai episentrum pertumbuhan.

Tulisan ini akan mengulas sisi lain Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023, yakni peran penting Indonesia dalam kerja sama ASEAN+3 yang beranggotakan 10 negara ASEAN dan negara "*Plus Three*", yaitu Tiongkok, Jepang, dan Republik Korea.

Selain menjadi Ketua ASEAN, Indonesia pada tahun 2023 juga bertindak sebagai ketua bersama (*Co-Chairmanship*) Forum kerja sama keuangan ASEAN+3 bersama dengan Jepang. Dalam forum keuangan ASEAN+3, Keketuaan dilakukan secara bersama oleh satu wakil negara ASEAN yang bertindak sebagai *Chair* ASEAN dan satu wakil negara "*Plus Three*" secara bergiliran. Untuk tahun 2023, *Co-Chairmanship*

[7]Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal
[8,10]Analis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal
[9]Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal

ASEAN+3 dipegang oleh Indonesia dan Jepang. Indonesia terakhir menjadi *Co-Chairmanship* kerja sama keuangan ASEAN+3 adalah di tahun 2011.

Sekilas Kerja Sama Keuangan ASEAN+3

Kerja sama ASEAN+3 dimulai pada tahun 1997, di saat krisis keuangan melanda Asia. Sejak itu kolaborasi di kawasan Asia Timur semakin berkembang dan telah menjadi salah satu kerangka kerja sama yang komprehensif. Lingkup kerja sama ini terdiri atas berbagai sektor, antara lain politik, kesehatan, pendidikan, energi, lingkungan, dan yang akan dielaborasi lebih lanjut dalam tulisan ini yakni kerja sama di sektor keuangan.

Pertemuan formal tingkat Menteri Keuangan dalam kerangka kerja sama keuangan ASEAN+3 kedua dilakukan di Chiang Mai, Thailand, pada tahun 2000, dan menghasilkan kesepakatan "*Chiang Mai Initiative* (CMI)". Pertemuan tersebut menindaklanjuti "*Joint Statement on East Asia Cooperation*" yang dikeluarkan oleh para Pemimpin ASEAN+3 di Manila, Filipina, pada tahun 1999.

Sementara pada tahun 2012, forum pertemuan tingkat menteri untuk bidang keuangan ASEAN+3 diperluas dengan melibatkan partisipasi dari para Gubernur Bank Sentral ASEAN+3. Pasalnya, agenda yang dibahas tidak hanya meliputi kewenangan dari Kementerian Keuangan, namun juga kewenangan dari Bank Sentral di masing-masing negara anggota.

Perkembangan Agenda Kerja Sama Keuangan ASEAN+3

CMI adalah *Regional Financial Agreements* (RFA) pertama yang dibentuk dalam kerja sama ASEAN+3 pada tahun 2000, merupakan *network of bilateral swap* yang mencakup seluruh negara ASEAN dan negara "*Plus Three*". CMI ditujukan sebagai *self-help* dan *support mechanism* untuk negara-negara anggota yang mengalami kesulitan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek. Pembentukan CMI juga ditujukan sebagai pelengkap dari fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan internasional. Pada tahun 2010, CMI dirubah menjadi *CMI Multilateralization* (CMIM). Pada dasarnya, CMIM tetap merupakan mekanisme *swap arrangement* namun dinaungi dalam satu kesepakatan bersama (*CMIM Agreement*), yang di dalamnya mengatur antara lain komitmen dan mekanisme dukungan bantuan keuangan secara bersama kepada negara anggota yang dilanda krisis. Pada awalnya, total komitmen bersama dalam CMIM adalah USD 120 miliar, namun saat ini telah meningkat menjadi USD 240 miliar.

Sejalan dengan pembentukan CMIM, di 2010 negara-negara ASEAN+3 juga menyepakati pembentukan *ASEAN+3 Macroeconomic Research Office* (AMRO) yang berkedudukan di Singapura dan berfungsi sebagai *surveillance unit* dari CMIM. AMRO memiliki peran penting untuk memantau dan menganalisis perekonomian kawasan, dan berkontribusi terhadap deteksi dini risiko, serta mendukung implementasi proses pengambilan keputusan terkait CMIM yang dilakukan secara cepat dan efektif. Berbekal pengalaman krisis yang terjadi di kawasan, *surveillance* yang dilakukan oleh AMRO atas negara anggota dan kawasan memegang peranan yang sangat penting, mengingat peran AMRO sebagai "*regional family doctor*" untuk stabilitas ekonomi makro dan keuangan. Pada 2016, AMRO status berubah menjadi organisasi internasional guna memberikan legalitas yang lebih kuat dan memperkuat mandat yang lebih luas dalam mendukung CMIM, sebagai *surveillance* kawasan, serta mendukung *technical assistance* bagi negara-negara anggota ASEAN+3.

Kerja sama keuangan ASEAN+3 juga sangat menitikberatkan pada studi atas isu-isu terkini maupun potensi isu-isu di masa mendatang yang memiliki potensi risiko terhadap stabilitas makroekonomi dan keuangan negara anggota dan kawasan. Beberapa studi penting yang telah ikut mendukung kerja sama di

kawasan ASEAN+3 antara lain mencakup studi peningkatan stabilitas keuangan regional melalui pemantauan arus modal, eksplorasi RFA, dan implementasi langkah-langkah untuk meredam dampak volatilitas arus modal. Peningkatan peran mata uang lokal juga merupakan aspek penting yang terus menjadi perhatian di kawasan. Hal ini meliputi antara lain pengembangan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal serta upaya meningkatkan transaksi mata uang lokal. Selain itu, pembiayaan infrastruktur juga menjadi perhatian yang berulang dalam studi di kawasan. Fokus studi dalam beberapa tahun belakangan juga bertambah, selain tetap mengutamakan perhatian atas isu stabilitas, namun juga lebih menitikberatkan pada isu terkini terkait perubahan iklim dan transisi energi.

Agenda kunci lainnya yang dikembangkan dalam kerja sama ASEAN+3 adalah *Asian Bond Market Initiative* (ABMI) yang dicanangkan sejak tahun 2003 dengan bantuan *Asian Development Bank* (ADB). ABMI bertujuan untuk mengembangkan pasar obligasi yang efisien dan likuid di kawasan, yang akan memungkinkan pemanfaatan *saving* di kawasan untuk mendanai investasi di dalam kawasan. Selain itu, ABMI juga akan berkontribusi dalam memitigasi *currency* dan *maturity mismatches* dalam pembiayaan yang dibutuhkan oleh kawasan.

Salah satu komponen utama dari *Asian Bond Markets Initiative* (ABMI) adalah dibentuknya *Credit Guarantee and Investment Facility* (CGIF) pada tahun 2010, sebuah lembaga pengelola dana perwalian yang didirikan oleh ADB bersama dengan 13 negara ASEAN+3. CGIF didirikan untuk mendorong pengembangan dan penguatan pasar keuangan regional terutama melalui dukungan pemberian kredit dalam penerbitan obligasi korporasi dalam mata uang lokal di negara-negara ASEAN+3.

Capaian Keketuaan Indonesia-Jepang dalam Kerja Sama Keuangan ASEAN+3 2023

Co-Chairmanship Indonesia dan Jepang 2023 telah menghasilkan berbagai capaian yang signifikan dalam memperkuat kerja sama keuangan di ASEAN+3. Beberapa capaian strategis tersebut antara lain terkait penguatan RFA, AMRO *governance, Disaster Risk Financing (DRF) Initiative,* dan penguatan studi terkait isu-isu prioritas untuk memperkuat stabilitas dan kerja sama di kawasan.

Terkait penguatan RFA, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 menyambut baik pembahasan mengenai pembentukan fasilitas pinjaman baru yang disebut dengan *Rapid Financing Facility* (RFF). Pembentukan fasilitas baru ini ditujukan untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dapat dialami oleh negara anggota akibat adanya *sudden exogenous shocks*, seperti pandemi dan bencana alam. Instrumen RFF ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dari berbagai instrumen pembiayaan yang sudah ada saat ini di dalam CMIM. Selain itu, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 menyambut baik penyelesaian sebagian prosedur dalam penguatan CMIM yang memungkinkan penggunaan mata uang lokal berdasarkan prinsip sukarela (*voluntary*) dan berdasarkan permintaan (*demand-driven*).

Terkait penguatan AMRO, *Co-Chairmanship* Indonesia dan Jepang berhasil mendorong penguatan *governance* melalui penambahan *Senior Management* dalam struktur organisasi AMRO guna mendukung penguatan surveillance dan studi-studi tematik dalam memperkuat stabilitas ekonomi kawasan. Selain itu, *inclusivity* dan *geographical balance* juga menjadi pandangan umum negara anggota dalam memperkuat AMRO guna meningkatkan *ownership* dan keikutsertaan seluruh negara anggota dalam mendukung kinerja yang dimandatkan kepada AMRO.

Co-Chairmanship Indonesia-Jepang juga telah mendorong kesepakatan negara anggota ASEAN+3 untuk suatu agenda baru yang akan secara reguler dibahas dalam proses keuangan ASEAN+3, yaitu *Disaster Risk Financing*

(DRF) Initiative. Agenda DRF *Initiative* ditujukan untuk memperkuat ketahanan kawasan terhadap potensi kerugian ekonomi dan keuangan dikarenakan semakin meningkatnya risiko tingkat kerusakan dan frekuensi bencana alam di kawasan. Pada tahun 2023, *ASEAN+3 Action Plan of DRF Initiative* telah disahkan, yang salah satu tujuannya adalah untuk menghubungkan antara inisiatif *ASEAN Disaster Risk Financing and Insurance* di bawah kerja sama keuangan, dengan *South East Asia Disaster Risk Insurance Facility* (SEADRIF).

Studi-studi tematik yang dilakukan pada tahun 2023 memiliki relevansi kuat guna mencegah potensi risiko yang muncul dari dalam kawasan, antara lain dapat bersumber dari *Corporate* dan *Household Debt*. Selain itu, upaya untuk mendukung perkembangan penggunaan mata uang lokal kawasan juga telah dilakukan melalui studi *Local Currency Transaction* di Kawasan, termasuk pula studi yang sejalan dengan perkembangan terkini di dunia guna mendukung *sustainable finance* di kawasan yang sejalan dengan perkembangan saat ini guna menuju dunia yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan.

Penutup

Dalam Keketuaan bersama di forum keuangan ASEAN+3, Indonesia telah menunjukkan *leadership* yang kuat dengan mengedepankan inisiatif-inisiatif yang sejalan dengan kepentingan nasional maupun kepentingan regional dalam upaya menjaga dan memperkuat stabilitas di kawasan. Pengalaman beberapa krisis yang dialami oleh kawasan telah memberikan fondasi yang kuat bagi negara-negara ASEAN+3 untuk senantiasa mempertahankan nilai penting agenda RFA dalam bentuk CMIM yang didukung oleh *regional surveillance unit* yang kuat di AMRO, serta didukung oleh studi-studi yang relevan dalam menghadapi tantangan di masa kini maupun potensi tantangan di masa mendatang. Inisiatif-inisiatif baru yang dikembangkan guna mengantisipasi risiko dan menjawab tantangan regional maupun global juga telah memberikan fleksibilitas dalam kerja sama keuangan ASEAN+3 untuk senantiasa relevan, adaptif dan berkontribusi penting bagi stabilitas dan perekonomian negara anggota, kawasan maupun dunia sebagaimana tema besar Keketuaan Indonesia di ASEAN "***ASEAN Matters: Epicentrum of Growth***".

Menilik Potensi Inisiatif ASEAN+3 DRF bagi Upaya Pengelolaan Risiko Bencana di Indonesia

Sausan Afifah Muti[11] & Veri Agustina[12]

Dalam rangkaian keketuaan Indonesia bersama dengan Jepang di ASEAN+3, sektor kerja sama keuangan ASEAN+3 baru saja menyelesaikan pertemuan ASEAN+3 *Taskforce Meeting* di Lombok pada akhir Oktober lalu, Indonesia. Pertemuan tersebut mendiskusikan berbagai agenda bersama di jalur keuangan, termasuk salah satunya agenda pendanaan risiko bencana.

Agenda pendanaan risiko bencana baru saja disetujui oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral pada Mei lalu untuk menjadi agenda rutin forum ASEAN+3. Dilansir dari *Joint Statement of the 26th* ASEAN+3 *Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting*, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 menekankan pentingnya memperkuat resiliensi kawasan terhadap potensi kerugian ekonomi dan keuangan mempertimbangkan meningkatnya frekuensi dan keparahan bencana.

Dapat dipahami mengapa agenda pendanaan risiko bencana menjadi salah satu prioritas untuk didorong di ASEAN+3. Kawasan ini memiliki total PDB lebih

[11,12]Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal

dari USD 27 triliun, namun memiliki risiko bencana yang beragam, mulai dari banjir, gempabumi dan bencana lainnya. Dengan potensi ekonomi yang besar, tentunya risiko kerugian yang dihadapi akibat bencana juga besar.

Sebelum formalisasi DRF sebagai agenda rutin di ASEAN+3, ASEAN sendiri sebenarnya sudah memiliki beberapa inisiatif kawasan untuk pendanaan risiko bencana, diantaranya adalah ASEAN Cross-Sectoral Coordination Committee on Disaster Risk Financing and Insurance (ACSCC—DRFI atau lebih dikenal dengan A-DRFI) dan South-East Asia Disaster Risk Insurance Facility (SEADRIF).

A-DRFI adalah forum yang di-endorse oleh para Menteri Keuangan ASEAN pada tahun 2013 untuk mengawal implementasi the ASEAN DRFI Roadmap. Sejak 2019, kerja sama A-DRFI sudah memasuki tahapan kedua dan tahun ini merupakan akhir dari fase II A-DRFI tersebut. Output yang dihasilkan pada periode ini adalah pembuatan Platform ADRFI Phase II dan *Country Report Review on DRFI Strategy*. Platform yang dikembangkan dengan bantuan Nanyang Technological University (NTU) tersebut menyediakan informasi risiko bencana negara-negara anggota dan kawasan, termasuk perkiraan kerugian akibat bencana-bencana tertentu.

Selain A-DRFI terdapat pula inisiatif dari forum ASEAN+3 yaitu SEADRIF yang merupakan sebuah *platform* penyedia fasilitas dan solusi pembiayaan risiko bencana melalui asuransi bagi negara anggota ASEAN. Solusi pembiayaan salah satunya diberikan melalui SEADRIF Insurance Company dengan menyediakan produk asuransi katastropik bagi para anggota, seperti skema asuransi banjir yang sudah dimanfaatkan oleh Laos dan Myanmar. Saat ini Indonesia berpartisipasi dalam salah satu *Technical Working Group* (TWG) terkait perlindungan aset publik atau Barang Milik Negara (BMN). Dengan keikutsertaaan dalam TWG ini, Indonesia bisa mendapatkan bantuan teknis, pertukaran pengetahuan, dan layanan konsultasi dalam mengembangkan *roadmap* skema asuransi perlindungan BMN terhadap risiko bencana di dalam negeri.

Jika dibandingkan dengan inisiatif yang sudah berjalan, ASEAN+3 DRF sebetulnya ditujukan untuk memperdalam dan memperluas kerja sama DRF di kawasan yang mengedepankan sinergi dengan inisiatif lainnya yang sudah ada. ASEAN+3 DRF membuka kesempatan bagi para anggota untuk membahas, secara intensif dan berkelanjutan, mengenai (i) solusi finansial guna memperkuat kesiapan finansial terhadap bencana (melalui produk SEADRIF, mekanisme dana kontinjensi, dan penerbitan obligasi); (ii) memperoleh pelatihan dan pertukaran pengetahuan dengan dukungan mitra organisasi internasional seperti Bank Dunia atau ADBI; dan (iii) mengembangkan repositori data untuk memperkuat akses terhadap pemodelan risiko serta pemantauan risiko dan dampak bencana di kawasan.

Dengan berakhirnya ADRFI fase II dan terbatasnya penerima manfaat produk asuransi katastropik SEADRIF, pendalaman dan eskalasi isu DRF pada forum ASEAN+3 memang memberikan *angin segar* baru bagi kedua inisiatif sebelumnya. Namun, apakah hal tersebut memberikan nilai tambah bagi Indonesia dalam keikutsertaannya pada ASEAN+3 DRF? mengingat dalam implementasi inisiatif A-DRFI dan SEADRIF pun, Indonesia menghadapi beberapa kendala, khususnya terkait isu regulasi dan sensitivitas data.

Terkait kendala regulasi, Pemerintah Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan inisiatif SEADRIF karena peraturan nasional kita tidak memungkinkan adanya perusahaan asuransi asing (kepemilikan penuh) untuk memasarkan produk asuransi di pasar domestik. Berdasarkan UU nomor 40 tahun 2014, perusahaan perasuransian yang beroperasi di Indonesia hanya dapat dimiliki sepenuhnya oleh WNI atau bersama-sama dengan warga negara atau badan hukum asing yang harus merupakan perusahaan perasuransian atau anak perusahaan yang

bergerak di bidang usaha perasuransian. Sementara itu, SEADRIF Insurance Company resmi terdaftar dan beroperasi di Singapura. Meskipun berdasarkan MoU perusahaan tersebut dimiliki oleh seluruh anggota SEADRIF Trust, termasuk Indonesia, namun modal awal untuk operasionalisasi dan pengembangan produk berasal dari Singapura dan Jepang.

Di sisi lain, inisiatif yang dihasilkan dari A-DRFI juga belum dapat dimanfaatkan dengan baik karena Pemerintah masih mengkhawatirkan keamanan dan sensitivitas data yang akan dibagi dalam platform tersebut. Kekhawatiran ini dinilai wajar, mengingat dalam era digital saat ini *"data is the new currency"*. Oleh karena itu, ketika Pemerintah Indonesia nantinya bersedia berbagi data yang akan diolah oleh NTU sebagai data kebencanaan regional melalui platform A-DRFI, seperti data aset BMN, sepatutnya dipertimbangkan apakah nantinya data kebencanaan Indonesia yang dibagikan dalam platform ini aman? Apakah nanti kepemilikan atas data kebencanaan nasional akan membuka kesempatan bagi pihak lain untuk memanfaatkan data ini, namun berdampak negatif bagi Indonesia?

Terlepas dari tantangan-tantangan domestik tersebut, agenda DRF yang telah menjadi agenda rutin forum kerja sama keuangan ASEAN+3 yang perlu dimanfaatkan oleh Indonesia. Tentunya dengan mempertimbangkan perkembangan serta peta jalan Indonesia ke depan, sebagaimana tercantum pada Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) yang diluncurkan pada tahun 2018 lalu. Strategi PARB ini terdiri atas bauran berbagai kebijakan dan instrumen pembiayaan antara lain alokasi APBN/APBD, *Pooling Fund* Bencana, pinjaman siaga, asuransi barang milik negara, asuransi katastropik, asuransi rumah tangga, dan bantuan lainnya.

Forum ASEAN+3 memiliki tiga area prioritas yang berpeluang untuk dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Pertama, di area solusi keuangan, Indonesia dapat memanfaatkan forum ini untuk memperkaya pilihan instrumen pada strategi PARB nasional ke depan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Strategi PARB terdiri atas berbagai opsi instrumen keuangan untuk dapat diimplementasikan baik pada jangka pendek maupun menengah. Solusi keuangan yang dikembangkan ASEAN+3 DRF dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dalam melengkapi implementasi Strategi PARB ke depan dan meningkatkan resiliensi keuangan terhadap risiko bencana.

Selanjutnya, pada area kedua yaitu solusi pengetahuan, Indonesia dapat mengusulkan berbagai forum diskusi/*sharing session* yang sesuai dengan kebutuhan dalam negeri. Selain itu, Indonesia juga dapat mengusulkan berbagai bantuan teknis yang mendukung pengembangan Strategi PARB nasional. Terlebih, forum ASEAN+3 yang melibatkan negara-negara besar seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan juga memiliki keunggulan sumber daya jika dibandingkan dengan forum yang beranggotakan negara anggota ASEAN saja.

Ketiga, pada area teknis, Indonesia dapat memanfaatkan pengembangan model dan data bagi kebutuhan PARB di Indonesia. Fokus area ini juga diperkirakan akan dimanfaatkan sebagai kelanjutan program ADRFI yang telah berakhir tahun ini. Memang terdapat tantangan di ranah domestik di mana tidak semua data domestik dapat dibagikan dalam platform kerja sama A-DRFI, namun hal tersebut tidak perlu menjadi batu sandungan. Dalam praktik A-DRFI, NTU sebagai pengembang platform memiliki data publik yang dapat diolah sehingga justru memperkaya pilihan modeling yang dapat menjadi referensi bagi Indonesia.

Sementara itu, tantangan juga terdapat pada keterbatasan peraturan perundangan dan regulasi yang saat ini masih menghambat optimalisasi implementasi instrumen PARB, khususnya terkait SEADRIF. Bagaimanapun tidak

dapat dipungkiri bahwa kerja sama di ASEAN+3 ini tidak hanya berupa pemberian bantuan teknis, namun juga akhirnya akan mengerucut pada pemanfaatan SEADRIF sebagai perusahaan asuransi. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana dengan tantangan regulasi yang membatasi kepemilikan asing pada perusahaan asuransi di Indonesia? Hal ini perlu disikapi dengan bijak. Terlebih regulasi yang ada tentunya telah mempertimbangkan kepentingan nasional. Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan fasilitas asuransi SEADRIF sepanjang perusahaan tersebut mengikuti ketentuan perundangan di Indonesia. Untuk saat ini, Indonesia dapat memanfaatkan forum ASEAN+3 sebagai sarana untuk bertukar pandangan terkait kebijakan DRF dengan negara anggota lainnya. Hal ini sesuai dengan Rencana Aksi ASEAN+3 DRF 2023-2025 yang menetapkan kegiatan terkait dengan dialog kebijakan dan implementasi inisiatif DRF sebagai salah satu prioritasnya. Indonesia dapat memanfaatkan forum ini untuk memperoleh pandangan atas pengaturan mengenai asuransi di negara anggota lainnya.

Berbagai tantangan tersebut seyogyanya tidak menjadi halangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan forum ASEAN+3 ini. Terlebih, agenda DRF baru saja menjadi agenda rutin di ASEAN+3 dan Rencana Aksi yang telah ditetapkan pada forum ini pun masih berada pada tahap awal implementasinya. Oleh karenanya, peluang pemanfaatan forum ini masih sangat terbuka lebar. Indonesia dapat mendasarkan pemanfaatan forum ASEAN+3 ini pada Strategi PARB, seperti asuransi yang disediakan SEADRIF dan berbagai bentuk *capacity building* dan pengembangan data risiko bencana. Memang masih terdapat kendala dari sisi domestik Indonesia untuk memanfaatkan forum ini secara optimal. Namun, sembari menunggu kesiapan dari sisi tersebut, Indonesia dapat terus memanfaatkan berbagai solusi prioritas yang ditawarkan inisiatif ini dan justru bersama-sama mencari *win-win solution* bagi semua pihak.

Yogi Rahmayanti

Kali Ketiga, Unjuk Gigi Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023

Indha Sendary[13]

Setelah sukses dalam menjalankan Presidensi G20, Indonesia kembali menunjukan kepemimpinannya dalam forum internasional sebagai Ketua ASEAN 2023. Sepanjang tahun ini, Indonesia telah menyelenggarakan berbagai pertemuan untuk membahas isu – isu yang menjadi tantangan dan perhatian ASEAN. Bagaimana Indonesia menjalankan perannya sebagai pemimpin ASEAN di kali ketiganya? Berhasilkah Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional dan ASEAN dalam tahun ini? Dalam edisi Warta Fiskal kali ini, tim redaksi mewawancarai Yogi Rahmayanti, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal selaku salah satu pimpinan beberapa isu dalam pertemuan di jalur keuangan ASEAN 2023.

Pada setiap keketuaan, negara anggota yang berkesempatan memimpin jalannya pertemuan selama satu tahun, selalu memiliki tema yang berkaitan dengan kepentingan negara tersebut dan juga isu – isu yang menjadi perhatian seluruh negara anggota. Begitu pun yang terjadi dengan Indonesia.

Menurut Yogi, pertimbangan tema Indonesia di ASEAN 2023, memiliki pendekatan yang sama dengan forum lain, yaitu dengan mengikuti perkembangan isu – isu di dunia.

"Kalau saat ini, paling dekat adalah pasca pandemi. Ini kan pertanyaan selanjutnya itu bagaimana kita *recover*, jadi ini tema utamanya. Kemudian kita melihat suasana geopolitik dan ekonomi di dunia. Kalau dilihat indikator ASEAN, masih cukup optimis ada pertumbuhan signifikan. Untuk itu kita mau *promote recovery* dan *showcase*

[13]Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

ASEAN masih tumbuh signifikan, jadi temanya *"Epicentrum of Growth"*, jelas wanita kelahiran Kediri tersebut ketika ditanya alasan pemilihan tema Indonesia di tahun 2023.

Selain itu, menurutnya, terdapat agenda – agenda penting yang diusung sejak G20, yang dalam hal ini Pemerintah Indonesia rasa perlu dilanjutkan di skala ASEAN karena manfaatnya akan besar untuk negara anggota. Ia pun mencontohkan seperti isu mengenai kolaborasi antara Keuangan dan Kesehatan.

"Ini yang di G20 menghasilkan *deliverable* konkrit seperti *Pandemic Fund*. Di Keketuaan ASEAN 2023, kita untuk pertama kali, menghimpun Menkeu dan Menkes di ASEAN dalam satu forum untuk bicara dan mendiskusikan masalah seperti *financing gap* yang besar sekali untuk antisipasi pandemi. Sebab, kalau didengar dari *expert*, kemungkinan pandemi untuk terjadi lagi cukup besar", ungkap Yogi.

Wanita yang merupakan jebolan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tersebut pun menambahkan, untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi, terutama dalam pembiayaan, menjadi salah satu isunya. "Jadi, pemilihan tema Indonesia merupakan kombinasi bacaan mengenai kondisi dunia dan juga misi – misi Indonesia untuk megusung isu – isu tertentu", lanjut Yogi.

Dalam setiap pertemuan dan diskusi di forum – forum internasional, salah satu hal yang menarik untuk diketahui adalah jalannya sesi diskusi, mulai dari pertemuan dari lingkup *Working Committee* hingga pertemuan di tingkat Menteri. Yogi pun mengungkapkan bahwa diskusi dalam memperjuangkan isu baru yang berkaitan dengan kepentingan nasional, menjadi tantangan tersendiri. Menurut pengalaman wanita yang memperoleh gelar Doktor dari Osaka University tersebut, isu – isu baru yang diusung cukup *challenging* untuk dimasukkan dalam agenda diskusi, karena tiap negara anggota memiliki kepentingannya masing – masing.

"Dalam isu baru, untuk memasukkan ke dalam agenda, perlu memperjuangkan dan mengawal isunya berkelanjutan, karena semua negara punya prioritas dan isunya perlu dilanjutkan, sehingga isu yang akan didiskusikan akan banyak sekali. Contohnya, kolaborasi keuangan dan kesehatan, kita kawal sekali, agar ketua selanjutnya terus melanjutkan. Dan ini yang terus kita upayakan", terang Yogi menjelaskan.

Kemampuan untuk memecahkan masalah dan mencapai solusi pun juga menjadi kunci dalam jalannya diskusi. Ia mencontohkan, pada saat pertemuan di level deputi menuju pertemuan di tingkat Menteri, Ia perlu bergerak cepat dalam penyusunan konsep *Joint Ministerial Statement* yang menjadi *output* utama dalam pertemuan tingkat Menteri ASEAN. "Saat tingkat *deputies,* dapat *challenge* untuk mengubah satu paragraf yang biasanya melibatkan diskusi panjang. Saya perlu bergerak dan bertindak dalam waktu yang singkat untuk *approach* negara – negara dalam mengusulkan perubahan. Untuk mencapai konsensus tidak mudah. Di *last minute*, kalau tidak cepat *resolve* bisa tidak konsensus", terangnya mengenang momen tersebut.

Hasilnya, upaya Indonesia pun dalam memerjuangkan kepentingan nasional dan bersama membuahkan *output* yang cukup memuaskan. Indonesia dalam Keketuannya, berhasil mengenalkan konsep *cross collaboration* pada isu yang lebih luas. Konsep ini mendorong adanya kerja sama dan sinergi antar sektor, seperti isu keuangan dan kesehatan yang sempat ia singgung. Selain itu, Indonesia juga mendorong kolaborasi lintas sektor dalam isu ketahanan pangan. Menurut Yogi, selama ini kerja sama lintas sektor hanya ada dalam isu pembiayaan risiko bencana. Di tahun 2023, Indonesia mendorong agar isu mengenai kesehatan dan ketahanan pangan dimasukan dan menjadi perhatian bersama.

"Indonesia ingin wadah ini

direvitalisasi dan dijadikan payung bagi isu *cross collaboration* menjadi lebih inklusif. Di keketuaan mendatang, inisiatif Indonesia akan jadi payung bagi ASEAN Cross-Sectoral Coordination Committee (ACSCC) untuk isu kesehatan dan ketahanan pangan. Selain itu akan dibentuk 3 *sub-working* (ACSCC)", jelas Yogi.

Keberhasilan Indonesia dalam ASEAN 2023 juga terlihat dari diterbitkannya ASEAN *Taxonomy* Versi 2 yang erat kaitannya dengan isu keuangan dan ekonomi hijau. "Indonesia berhasilkan menerbitkan ASEAN *Taxonomy* 2, di mana pendanaan transisi masuk di sini yang sebelumnya tidak ada", tambah Yogi.

Pada isu infrastruktur, ASEAN *Infrastructure Fund* (AIF) dideklarasikan sebagai sebuah lembaga pendanaan infrastruktur hijau. "Selama ini infrastruktur yg didanai AIF kebanyakan dari infrastruktur hijau, ini berarti potensinya besar. AIF ini menjanjikan sekali karena tingkat *catalytic* karena mampu memobillisasi dana yang lebih besar".

Kesuksesan di isu lainnya, Indonesia berhasil mendorong sistem pembayaran lintas negara dengan menggunakan QRIS di ASEAN. Di isu perpajakan, semakin banyak negara yang bersedia untuk melakukan pertukaran informasi (*exchange of information*), termasuk berbagi pengalaman terbaik dalam *tax withholding*.

Dari segi kepemimpinan, Indonesia telah diakui sebagai negara yang dapat memimpin forum internasional dengan baik. "Kita *put Indonesia on the map in terms of* diplomasi internasional. Orang tidak hanya di ASEAN, tetapi G20 juga, sudah tahu *leadership* Indonesia. Jadi, semua akan *look up* ke kita. Termasuk di ASEAN+3, Indonesia didengar, dilihat, dan dimintai pendapat", tambah Yogi.

Penyelenggaraan *event* yang sangat baik sebagai bentuk *soft diplomacy*, menjadikan banyak negara menghargai kepemimpinan Indonesia. Selain itu, menurut Yogi, Indonesia tidak hanya memimpin dengan kepentingan "*self serving*" tetapi juga kepentingan bersama. "Tentu kita punya kepentingan, tapi tidak hanya untuk sendiri tetapi bermanfaat untuk semua. Beberapa negara agresif dan tidak objektif dalam menyampaikan argumen, *simply* agar diskusi berhenti dan hal seperti ini *could cause you respect*. Kita tidak mau seperti itu. Keketuaan ini memberikan kesempatan menunjukan karakter kita, dan menurut saya kita perlu perkuat *soft diplomacy* ini. Sebagai sebuah negara, kita punya *image* yang baik", terangnya.

Meski meraih sejumlah keberhasilan, masih ada beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah Indonesia,

untuk terus memperjuangkan kepentingan nasional dan ASEAN. Salah satunya Yogi mengungkapkan, dalam isu infrastruktur mengenai AIF. Mengingat potensinya yang besar, rekapitalisasi dana AIF ini merupakan PR yang harus diselesaikan. "Karena ini juga *perform* untuk mendanai sejumlah proyek, sehingga dananya makin tipis dan butuh untuk mendapatkan suntikan dana baru. Sedangkan negara ASEAN ini, negara berkembang semua. Sementara negara kaya tidak punya kepentingan untuk memanfaatkan dana tersebut", tambah Yogi.

Ia pun menjelaskan bahwa dalam AIF, pemegang modal terbesar adalah Indonesia dan Malaysia. Namun, Malaysia pun tidak mengakses dana tersebut karena terbentur di kebijakan dalam negerinya mengenai utang luar negeri. Hal ini yang menurut Yogi menjadi tantangan Indonesia untuk mendorong rekapitalisasi AIF, meyakinkan negara lain jika AIF ini berguna dan memberikan manfaat yang baik bagi seluruh anggota. Sebab menurutnya, akan ada konsekuensi biaya yang perlu dikeluarkan bagi negara anggota yang akan memanfaatkan dana, sehingga banyak negara masih *reluctant* dalam mengenai hal ini.

Keraguan yang sama juga terjadi pada isu *pandemic fund* dan juga ketahanan pangan. Untuk itu, menjadi tugas Indonesia untuk memformulasikan upaya – upaya dalam mendorong isu – isu yang menjadi kepentingan nasional untuk dipertahankan dan terus dilanjutkan pembahasannya dalam ASEAN. "Tantangan dalam ASEAN, di sini banyak *Working Committee* (WC). Bukan berarti Indonesia jadi *chair*, Indonesia akan jadi *chair* atas semua isu. Dan di WC, tidak ada batasan keketuaannya hingga berapa lama. Karena itu, Indonesia mengusulkan pertemuan level Menteri hingga dua kali. Hal ini tidak lazim dilakukan. Namun, pada saat itu Indonesia berpikir perlu melakukan *stock taking* seberapa jauh progress dari setiap isu yang dibahas di masing – masing WC. Di sini tantangannya, di mana ketika kita memiliki inisiatif, bagaimana kita mengendalikan diskusi ketika kita tidak jadi *chair*, karena di level Menteri belum tentu keputusannya sama di WC", jelas Yogi.

Selain AIF, *pandemic fund*, dan isu ketahanan pangan, Indonesia juga akan terus memperjuangkan isu mengenai ekonomi hijau dengan mendorong perluasan beberapa sektor dari *Taxonomy* Hijau yang sudah ada. Sebagai penutup, meski Indonesia sudah tidak memegang keketuaan, namun Indonesia masih menjadi *leader* dalam banyak isu dan terus berupaya memberikan manfaat bersama di ASEAN. Yogi pun berharap kepada pembaca Warta Fiskal, dengan *sharing experience* darinya, para pembaca memiliki ketertarikan dalam isu – isu yang dibawa Indonesia untuk diperjuangkan di forum internasional sehingga akan terus ada masukan dalam isu yang hendak didorong.

Kerja Sama Indo-Pacific Economic Framework (IPEF): Sebuah Inisiatif Baru

Nugroho Joko Sutanto[14] & Martin H. Lumbantobing[15]

Pada bulan November 2023, negara-negara anggota *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (IPEF) mengumumkan penyelesaian substansial perundingan IPEF *Clean Economy Agreement* dan the IPEF *Fair Economy Agreement.* Sebelumnya, pada bulan Mei 2023 IPEF *Supply Chains Agreement* sudah disepakati secara substantif. Capaian ini membawa proses perundingan IPEF semakin dekat ke titik akhir dengan menyisakan pembahasan pada IPEF *Trade Agreement.*

Amerika Serikat meluncurkan pembentukan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) pada bulan Mei 2022 yang beranggotakan 14 negara, yakni Australia, Brunei Darussalam, Fiji, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, New Zealand, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Inisiatif ini diharapkan memberikan manfaat nyata yang mendorong aktivitas ekonomi dan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta memberikan manfaat bagi pekerja dan konsumen di seluruh kawasan[16]. IPEF diharapkan dapat meningkatkan kerja sama ekonomi, baik dalam hal perdagangan, investasi, upaya pencapaian ekonomi hijau, dan aspek-aspek kerja sama ekonomi lainnya di antara negara-negara anggota.

[14]Analis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal
[15]Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal
[16]USTR on Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)

Berbeda dengan perjanjian ekonomi pada umumnya, IPEF tidak mengkomitmenkan pengurangan tarif bea masuk untuk perdagangan barang, meskipun terdapat pilar terkait perdagangan di dalam perjanjian ini. Hal ini terutama disebabkan oleh sikap Amerika Serikat yang ingin menghindari proses pengajuan izin ke parlemen, yang menjadi proses *mandatory* apabila Amerika akan mengurangi tarif bea masuk dalam suatu perjanjian. Amerika juga menyadari bahwa perundingan akan berlangsung cukup lama apabila substansi perjanjian memuat isu penurunan tarif bea masuk. Hal ini tidak sejalan dengan target Amerika untuk menyelesaikan perundingan di saat keketuaannya di APEC, sekaligus untuk dapat mengimbangi perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), perjanjian FTA terbesar saat ini, yang salah satu anggotanya adalah Tiongkok.

Perjanjian IPEF diyakini akan menjadi suatu perjanjian yang cukup signifikan di dalam peta kerja sama ekonomi dunia. Mengacu pada ukuran ekonomi negara-negara anggotanya, IPEF secara akumulatif akan menjadi perjanjian ekonomi terbesar di dunia.

PDB negara-negara IPEF di tahun 2022 mencapai USD40,19 trilliun, atau setara dengan 39,8% dari PDB dunia. Ada enam negara anggota IPEF yang masuk ke dalam jajaran anggota G-20, yakni Amerika Serikat, Jepang, India, Australia, Korea Selatan, dan Indonesia. Selain itu, seluruh negara ASEAN-5 juga masuk menjadi anggota IPEF. Forum ini juga mencakup jumlah yang signifikan dari total populasi dunia. Dengan total populasi 7,9 miliar jiwa, IPEF mencakup 32% dari total populasi dunia.

Gambar 1: Gambaran Kerja Sama IPEF

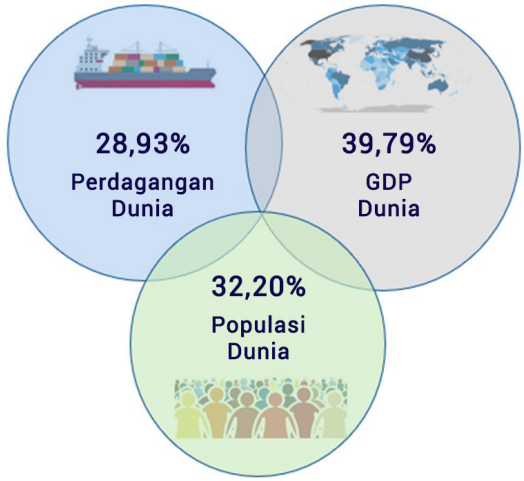

Hubungan Ekonomi Indonesia dengan anggota-anggota IPEF

Beberapa negara anggota IPEF merupakan negara-negara mitra utama Indonesia, baik dalam konteks perdagangan maupun investasi. Nilai ekspor Indonesia ke negara-negara IPEF di tahun 2022 secara kumulatif mencapai USD152,97 miliar atau mencapai 52,4% dari total ekspor Indonesia ke seluruh dunia. Dari sisi impor, pada tahun 2022 Indonesia mengimpor barang dari negara-negara anggota IPEF sebesar USD111,01 miliar atau mencapi 43,2% dari total impor Indonesia. Dengan demikian, nilai perdagangan bilateral Indonesia dengan negara-negara mitra mencapai USD263,9 miliar atau setara dengan 48,1% dari total perdagangan Indonesia ke seluruh negara mitra.

Apabila ditinjau dari sisi neraca perdagangan, Indonesia masih mencatatkan posisi surplus dengan negara-negara IPEF. Pada tahun 2022, nilai surplus tersebut mencapai USD41,9 miliar.

Beberapa negara IPEF merupakan mitra dagang utama Indonesia. Jepang merupakan negara IPEF dengan nilai perdagangan bilateral terbesar Indonesia dengan total perdagangan USD42 miliar. Hal ini menjadikan Jepang sebagai mitra dagang urutan kedua terbesar Indonesia. Amerika merupakan negara mitra dagang urutan ketiga Indonesia dengan total nilai perdagangan sebesar USD39,9 miliar. Selanjutnya, terdapat Singapura yang

Tabel 1. Kinerja Perdagangan Indonesia dengan Anggota IPEF dan FDI IPEF di Indonesia

Country	Export	Import	Bilateral Trade (USD mio)	Balance	FDI (USD Mio)
Japan	24.845,37	17.176,67	42.022,03	7.669	3.562,79
United States	28.239,11	11.681,59	39.920,70	16.558	3.026,23
Singapore	14.395,73	19.409,47	33.805,21	(5.014)	13.281,11
India	23.378,84	9.329,54	32.708,37	14.049	127,60
Malaysia	15.452,43	12.475,63	27.928,06	2.977	3.343,27
Korea Rep	12.813,69	11.718,18	24.531,87	1.096	2.297,84
Thailand	8.169,36	10.989,02	19.158,39	(2.820)	209,29
Phillipines	12.903,20	1.493,78	14.396,98	11.409	14,12
Australia	3.469,61	9.863,27	13.332,87	(6.394)	524,41
Viet Nam	8.286,04	4.817,80	13.103,84	3.468	0,02
New Zealand	731,92	1.397,38	2.129,30	(665)	3,70
Brunei	240,26	657,17	897,43	(417)	0,00
Fiji	40,48	0,73	41,21	40	-
Total	**152.966,04**	**111.010,23**	**263.976,26**	**57.266,00**	**26.390,38**
World	291.979,11	256.830,26	529.426,16		45.600,00
	52,4%	43,2%	49,9%		58%

Sumber: ITC Trademap dan Kementerian Investasi, diolah

merupakan mitra dagang utama di ASEAN, dengan nilai perdagangan mencapai USD33,8 miliar. Selain mitra-mitra dagang utama, di antara negara-negara IPEF terdapat pula mitra dagang non-tradisional Indonesia, yakni Fiji.

Dari sisi komoditas, produk ekspor Indonesia yang paling besar ke negara-negara IPEF adalah Batubara (HS 270119) dengan total nilai USD25,1 miliar, yang diekspor ke India, Filipina, Korea, Jepang, dan Thailand. Produk ekspor kedua Indonesia adalah *Palm Oil* (HS 151190) dengan total eskpor di tahun 2022 sebesar USD6,9 miliar dengan tujuan ekspor India, Amerika Serikat, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Selain itu, produk ketiga yang menjadi komoditas ekspor Indonesia adalah *Copper Ores* (HS 260300) dengan total ekspor ke negara IPEF di tahun 2022 adalah sebesar USD4,8 miliar yang diekspor ke Jepang, Korea Selatan, dan India.

Dari sisi investasi, Indonesia juga menerima aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) yang cukup signifikan dari negara-negara IPEF. Pada tahun 2022, total FDI yang diterima Indonesia dari anggota IPEF lainnya adalah sebesar USD26,39 miliar atau setara dengan 58% dari total FDI yang diterima oleh Indonesia di tahun 2022. Singapura menjadi investor utama dengan nilai FDI sebesar USD13,28 miliar. Di urutan kedua adalah Jepang dengan nilai investasi sebesar

Tabel 2. Produk Ekspor Utama Indonesia ke Negara-Negara IPEF, Akumulatif

HS CODE	Product	Total	Japan	USA	Singapore	India	Malaysia	Korea	Thailand	Filipina	Australia	Vietnam	NZ	BN	Fiji
270119	Coal, whether or not pulverised, non-agglomerated	25.105.237	1.703.773	-	-	10.409.013	3.286.396	2.705.150	1.319.382	4.635.966	-	971.906	67.594	6.057	-
151190	Palm oil and its fractions, whether or not refined	6.916.878	-	1.757.429	-	2.469.553	1.341.170	-	-	606.886	-	739.728	-	-	2.112
260300	Copper ores and concentrates	4.794.237	2.283.441	-	-	872.695	-	1.638.101	-	-	-	-	-	-	-
271111	Natural gas, liquefied	3.471.627	1.615.472	-	-	-	-	1.856.155	-	-	-	-	-	-	-
271121	Natural gas in gaseous state	3.043.569	-	-	3.043.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151110	Crude palm oil	2.851.528	-	-	-	2.851.528	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271019	Medium oils and preparations, of petroleum or bituminous minerals	1.977.057	-	-	1.072.214	-	904.843	-	-	-	-	-	-	-	-
870323	Motor cars and other motor vehicles	1.679.210	-	-	-	-	-	-	265.644	849.816	-	544.887	-	18.863	-
270900	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude	1.352.545	-	-	-	-	-	-	1.191.687	-	160.858	-	-	-	-
750110	Nickel mattes	1.235.938	1.235.938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: ITC Trademap, diolah

Gambar 2. Jaringan Kerja Sama FTA dan CEPA Indonesia dengan Negara IPEF

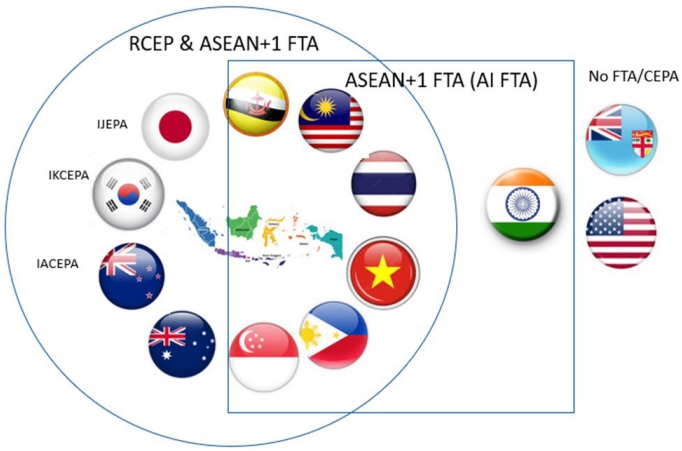

USD3,5 miliar diikuti dengan Malaysia dengan nilai FDI di Indonesia sebesar USD3,3 miliar. Amerika Serikat, yang merupakan inisiator IPEF memiliki investasi sebesar USD3 miliar.

Indonesia sebenarnya telah memiliki perjanjian perdagangan dan investasi dengan hampir seluruh negara IPEF. Jepang, Korea Selatan, Australia, New Zealand, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam bersama dengan Indonesia merupakan anggota RCEP. Indonesia juga bekerja sama dengan India melalui forum ASEAN India FTA. Selain itu, Indonesia memiliki perjanjian bilateral dengan Jepang melalui Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement, Korea Selatan (Indonesia Korea CEPA), dan Australia (IA CEPA). Namun demikian, Indonesia tidak memiliki perjanjian perdagangan maupun investasi dengan Amerika Serikat dan Fiji.

Potensi Manfaat IPEF

IPEF merupakan suatu kerja sama ekonomi dalam skala cukup besar. Dalam hal ukuran negara-negara yang terlibat, IPEF dapat menjadi suatu kerja sama ekonomi yang mengimbangi RCEP maupun CP TPP. Dalam hal cakupan, IPEF juga membahas isu yang cukup beragam melalui empat pilarnya. Mengacu pada hal tersebut, diharapkan IPEF dapat memberikan manfaat yang signifikan dan beragam bagi anggotanya. Hal ini dipertegas oleh para Menteri negara-negara IPEF yang menyatakan harapannya bahwa IPEF akan memperluas akses bagi pekerja, perusahaan, dan masyarakat di pasar IPEF, meningkatkan arus perdagangan dan investasi di perekonomian kita, meningkatkan standar, dan mengurangi hambatan perdagangan, mewujudkan ketahanan dalam rantai pasokan global, mendukung pencapaian *net zero emission*, dan mendorong upaya pemberantasan korupsi dan perwujudan sistem perpajakan yang baik[15]. Namun demikian, terdapat diskusi yang cukup panjang terkait efektivitas perjanjian IPEF untuk meningkatkan perdagangan dan investasi, mengingat perjanjian ini tidak mengkomitmenkan pengurangan tarif bea masuk untuk produk-produk anggota IPEF.

Terlepas dari diskusi tersebut, terdapat sejumlah manfaat yang berpotensi diperoleh Indonesia sebagai anggota IPEF, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas negara anggota dalam hal penyusunan dan implementasi kebijakan yang bermanfaat untuk menarik perdagangan dan investasi serta menyamakan standar dengan negara-negara maju melalui *capacity building* dan *technical cooperation*.
2. Forum pendekatan dengan negara anggota untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dalam rangka kerja sama bilateral ataupun di forum-forum multilateral lainnya, seperti upaya Indonesia untuk menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
3. Indonesia juga dapat memperoleh dukungan untuk mewujudkan program pertanian

[13]Ministerial Statements on IPEF Pillars

berkelanjutan. Isu agrikultur merupakan salah satu topik yang diperjanjikan di dalam Pilar I IPEF, termasuk pertanian berkelanjutan. Dengan komitmen yang disepakati di IPEF, Indonesia didorong untuk lebih serius mengembangkan dan mengimplementasikan program-program pertanian berkelanjutan. Upaya tersebut akan didukung berbagai *capacity building* yang akan disediakan IPEF. Keikutsertaan di IPEF ini juga menjadi kampanye positif bagi Indonesia terkait pertanian berkelanjutan di tengah tuntutan pasar global yang semakin tinggi terkait penerapan pertanian berkelanjutan dalam konteks perdagangan internasional.

4. Kerja sama IPEF juga secara tidak langsung dapat meningkatkan perdagangan dari Indonesia ke negara-negara IPEF untuk komoditas penting. Sebagai bagian dari perjanjian pilar II IPEF, negara-negara anggota akan menyampaikan daftar komoditas yang sangat dibutuhkan dalam perekonomian masing-masing negara. Indonesia dapat memanfaatkan daftar tersebut untuk memetakan komoditas yang dapat dipasok oleh Indonesia.
5. Kerja sama IPEF juga dapat mendorong proses pencapaian target *net zero* di Indonesia. Sebagai bagian dari implementasi perjanjian pilar III, Amerika Serikat melalui USDFC telah berkomitmen untuk mengucurkan dana USD300 juta untuk pembiayaan konsesi proyek infrastruktur berkelanjutan. Dana tersebut memobilisasi USD900 juta dalam modal ekuitas untuk diinvestasi ke negara-negara IPEF.
6. IPEF juga akan mendirikan suatu organisasi nirlaba yang diharapkan dibiayai Amerika Serikat untuk membantu dalam project preparation. Hal ini menjadi sangat penting bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang masih memerlukan dukungan dalam *project preparation* pada berbagai proyek hijau. Hal ini menjadi salah satu kunci penting untuk dapat mengakses sumber pendanaan hijau di pasar.
7. Keterlibatan Indonesia juga memberikan manfaat yang tidak kalah penting dalam aspek politik luar negeri. Sebagaimana dibahas sebelumnya, terdapat indikasi bahwa Amerika Serikat mengusulkan pembentukan IPEF untuk mengimbangi kerja sama RCEP yang diikuti oleh Tiongkok. Amerika Serikat secara tidak langsung memandang negara-negara yang terlibat di RCEP memiliki kedekatan ekonomi dan politik yang lebih dekat ke Tiongkok dibandingkan ke Amerika Serikat. Dengan keikutsertaan di IPEF, Indonesia dapat menepis pandangan tersebut dan mendudukkan Indonesia secara berimbang di antara dua kekuatan besar global, yakni Tiongkok dan Amerika Serikat. Hal ini diharapkan dapat berimplikasi positif dalam hal pengembangan jaringan kerja sama dan hubungan ekonomi maupun politik Indonesia dengan berbagai negara mitra di dunia, baik yang berada di kubu Amerika Serikat, maupun kubu Tiongkok.

Digital Trade Indonesia dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi Digital Kawasan ASEAN

Elvega Mediani Kinal[17] & Maikel Harris S[18]

Ekonomi digital kian berkembang pesat seiring dengan kemajuan riset, inovasi dan teknologi. Hal ini menjadi perhatian bagi negara maju dan berkembang dalam berlomba-lomba untuk unggul dalam industri digital. Fenomena ini muncul dengan dimulainya aktivitas *e-commerce* antar perusahaan ataupun individu yang meliputi distribusi dan transaksi digital barang dan jasa, serta dukungan pada penjualan barang dan jasa dengan menggunakan platform internet. Aktivitas ini dikenal dengan ekonomi digital yaitu seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Ekonomi digital ini membuat perubahan pada kegiatan ekonomi masyarakat serta bisnis, dari yang awalnya manual menjadi serba otomatis.

Studi Google Temasek, Bain & Company (2022), menyatakan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 sebesar USD 77 miliar atau tumbuh 22% (yoy) dan diprediksi akan meningkat hampir dua kali lipat hingga USD 130 miliar pada tahun 2025. Potensi tersebut disambut oleh momen keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 yang mengangkat transformasi ekonomi digital sebagai salah satu *deliverables* yaitu Ekonomi Digital dapat menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong sinergi dan inovasi kebijakan yang dapat menjadi *buffer* dalam perekonomian.

[17]Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal
[18]Analis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

Ditengah potensi yang ada, ASEAN belum memiliki perjanjian kerja sama yang bersifat mengikat mengenai *Digital Economy Agreement* (DEA) bagi seluruh negara anggota, bahkan setelah isu mengenai integrasi ekonomi digital mengemuka selama dua dekade. Semua komitmen terkait transformasi digital dalam konteks ASEAN tersebar dalam cakupan perjanjian perdagangan, termasuk dalam *Australia - New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA), *the ASEAN Agreement on Electronic Commerce, dan Regional Comprehensive Economy Partnership* (RCEP). Sejumlah pasal terkait integrasi ekonomi digital terus bertambah, namun komitmen yang ada pada perjanjian-perjanjian sebelumnya bersifat tidak cukup mengikat.

Hingga 3 September 2023, dalam pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC), para Menteri Perekonomian ASEAN telah meluncurkan perundingan mengenai *Digital Economy Framework Agreement in ASEAN* (DEFA), yang disebut-sebut sebagai perjanjian ekonomi digital besar pertama di dunia. DEFA terjadi setelah disahkannya kajian ASEAN DEFA pada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-55 di Semarang tanggal 19 Agustus 2023. Hasil dari kajian ini meliputi sembilan elemen inti termasuk perdagangan digital, e-commerce lintas batas, keamanan siber, ID digital, pembayaran digital, aliran data lintas batas, dan topik-topik baru yang diharapkan tercakup dalam negosiasi DEFA.

DEFA dianggap sebagai salah satu capaian yang besar dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN saat ini. Dengan terciptanya DEFA, ekonomi digital di kawasan diperkirakan akan bertambah hingga dua triliun dolar Amerika di tahun 2030 dan memperkuat dinamisme serta daya saing kawasan dalam ekonomi global.

Melalui perkembangan DEFA di ASEAN, salah satu elemen penting dalam suksesnya transformasi economy digital adalah dengan berkembangnya *digital trade,* yang tentunya tidak terlepas dari dukungan *digital infrastructure* yang kuat. *Digital trade*, yang dikenal sebagai *e-commerce* atau perdagangan elektronik, mengacu pada pembelian, penjualan, pertukaran produk, layanan, informasi melalui internet atau platform digital lainnya. *Digital trade* memungkinkan transaksi perdagangan dilakukan secara elektronik secara global, tanpa batasan geografis atau waktu. Konsep ini melibatkan penggunaan teknologi digital untuk mendukung berbagai aspek perdagangan, termasuk pembayaran, logistik, pemasaran, dan layanan pelanggan.

Potensi dari *digital trade* di Indonesia sangat besar. Indonesia memiliki populasi internet terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 170 juta pengguna internet aktif. Dengan adopsi teknologi yang terus meningkat, potensi pasar digital di Indonesia semakin besar. Beberapa perusahaan teknologi besar dan platform *e-commerce* internasional telah masuk ke pasar Indonesia, menunjukkan minat dan potensi besar yang ada.

Pengaruh dari *digital trade* terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan. Pertama, *digital trade* meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan perdagangan bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang sulit dijangkau oleh toko fisik. Ini memungkinkan masyarakat Indonesia untuk membeli produk dan layanan dengan lebih mudah, meningkatkan daya beli dan mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan.

Digital trade juga telah menjadi motor penggerak pertumbuhan bisnis. Banyak usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia mengadopsi model bisnis *online* yang memungkinkan mereka memperluas jangkauan pelanggan mereka hingga ke seluruh negeri bahkan global. Hal ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja baru.

Selain itu, *digital trade* juga dapat mendorong sektor lain dalam perekonomian Indonesia, seperti logistik dan pembayaran digital. Pertumbuhan *e-commerce* telah mendorong

perkembangan bisnis logistik, termasuk pengiriman dan pengelolaan rantai pasokan. Selain itu, berkembangnya pembayaran digital dan layanan keuangan juga terjadi secara bersamaan dengan pertumbuhan *digital trade*, memberikan kemudahan dalam bertransaksi bagi penduduk Indonesia.

Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam perkembangan *digital trade* di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya infrastruktur digital yang memadai, terutama di daerah daerah terpencil. Selain itu, masalah keamanan data dan privasi juga menjadi perhatian yang perlu ditangani dengan cermat.

Dalam rangka memaksimalkan potensi *digital trade* di Indonesia, pemerintah perlu berperan aktif dalam menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Investasi dalam infrastruktur digital dan pelatihan keterampilan digital juga perlu ditingkatkan. Jika potensi *digital trade* ini dapat dioptimalkan, Indonesia memiliki peluang untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. Optimalisasi potensi tersebut perlu dukungan pemerintah dalam menciptakan regulasi yang mendukung dan melindungi konsumen serta mengembangkan infrastruktur digital yang memadai.

Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Keuangan telah berupaya mendorong ekonomi digital yang dituangkan dalam beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) guna mendukung proses transaksi perdagangan lintas batas. Beberapa elemen yang diatur diantaranya mengenai perpajakan dan *e commerce* lintas batas, fasilitasi kepabeanan, logistik yang mendukung *e-commerce*, termasuk regulasi yang mengatur transaksi *paperless* pada perdagangan. Beberapa PMK yang telah dikeluarkan ialah:

i. aturan mengenai perpajakan dan fasilitas bea masuk pada perdagangan *e-commerce* lintas batas (PMK No. 199/2019 tentang Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman);

ii. barang digital non diskriminatif (PMK No. 60/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

dan beberapa aturan-aturan lainnya yang bertujuan untuk kelancaran transaksi dan menghindari aktivitas yang berpotensi mengganggu keseimbangan dalam negeri.

Peningkatan akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perdagangan digital dapat dicapai melalui beberapa langkah. Pertama, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan atau program pendidikan yang mendorong UKM untuk mengadopsi teknologi digital. Dengan memberikan pelatihan dan dukungan, UKM dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk beroperasi secara online dan mengakses pasar global.

Selain itu, pemerintah juga dapat memfasilitasi akses pasar bagi UKM melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi. Jaringan yang cepat dan stabil akan memungkinkan UKM untuk terhubung dengan pasar global dengan lebih mudah dan efisien.

Jalan Panjang Negosiasi Jasa Keuangan ASEAN

Cahya Agus Ismir[19] & Imran Rosjadi[20]

Tidak terasa negosiasi jasa keuangan ASEAN telah selesai dilakukan melalui perundingan putaran kesembilan jasa keuangan di bawah *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS). Selesainya negosiasi putaran kesembilan jasa keuangan ini ditandai dengan telah disepakatinya *Protocol to Implement the Ninth Package Financial Services under ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)* atau Protokol ke-9 Jasa Keuangan yang dilakukan pada forum *Working Committee on Financial Services Liberalisation (WC-FSL)* yang mendapatkan mandat dari *ASEAN Finance Minister and Central Bank Governor Meeting* (AFMGM). Protokol kesembilan jasa keuangan tersebut merupakan protokol pembukaan akses pasar terakhir dibawah AFAS.

Pembukaan akses pasar pada sektor jasa keuangan ini dilakukan sebagai salah satu pendukung pembentukan cita-cita ASEAN sebagai basis produksi dan pasar tunggal. Pembukaan akses pasar ini merupakan langkah strategis untuk mendukung tercapainya cita-cita ASEAN tersebut. Khusus di sektor kerjasama keuangan dan moneter, pembukaan akses jasa keuangan merupakan salah satu langkah yang penting dilakukan untuk melaksanakan *Roadmap for Monetary and Financial Integration of ASEAN* atau

[19]Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal
[20]Analis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

sering di singkat sebagai RIA-FIN yang ditetapkan pada tahun 2003. RIA-FIN ditetapkan untuk lebih memperdalam integrasi keuangan dan moneter ASEAN pada tahun 2015. Peta jalan tersebut mencakup: (i) pengembangan pasar modal ASEAN, (ii) liberalisasi jasa keuangan, dan (iii) liberalisasi neraca modal.

Sebagai tindak lanjut implementasi RIA-FIN tersebut, pada bulan Maret 2015, diadakan pertemuan *1st Joint Meeting of the ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM)* di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan AFMGM menegaskan kembali dukungan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN terhadap kegiatan-kegiatan di bawah RIA-FIN di ASEAN yang pada gilirannya akan mempertahankan tujuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Langkah selanjutnya pada pertemuan AFMGM ke-2 di Vientiane, Laos, disahkan Rencana Aksi Strategis (SAPs) Integrasi Keuangan ASEAN 2016-2025. SAPs tersebut mencakup promosi integrasi keuangan, inklusi keuangan, dan stabilitas keuangan di ASEAN dan sejalan dengan Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal ini juga mencakup tindakan kebijakan, target dan tonggak sejarah untuk memandu implementasi inisiatif integrasi sektor keuangan.

Negosiasi dan hasil pembukaan akses pasar di ASEAN

Untuk mewujudkan integrasi sektor jasa keuangan ASEAN maka digulirkan rangkaian perundingan dan negosiasi yang menghasilkan berbagai kesepakatan pembukaan pasar jasa keuangan yang selanjutnya dituangkan dalam rangkaian protokol dengan *Schedule of Commitment (SoC)* sebagai lampirannya yang telah dilaksanakan selama lebih dari 28 tahun. Perundingan dan negosiasi selesai dengan adanya penandatanganan *AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services)* pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, dengan komitmen di WTO dijadikan sebagai komitmen inisial ASEAN di bawah AFAS. Pada komitmen inisial tersebut, belum ada komitmen tambahan di sektor jasa keuangan yang ditawarkan oleh Indonesia di ASEAN.

Pada perundingan putaran pertama Indonesia baru memberikan komitmen liberalisasi jasa keuangan dengan memberikan komitmen WTO plus pada sektor jasa keuangan perbankan. Hal ini bisa terlihat dengan ditambahkannya tiga ibukota propinsi yaitu Padang, Manado, dan Ambon dimana kantor cabang bank asing di Indonesia atau bank patungan asing diperbolehkan untuk membuka kantor perwakilan atau kantor cabangnya. Sedangkan untuk *foreign equity participation* oleh investor untuk mendirikan bank asing masih belum berubah sebagaimana komitmen yang ditawarkan Indonesia di WTO yaitu dengan maksimal 49%. Sedangkan untuk sektor jasa keuangan non-perbankan seperti sektor jasa asuransi, pasar modal, dan sektor jasa keuangan lainnya Indonesia belum memberikan tambahan komitmen selain yang tercantum di WTO.

Selanjutnya putaran kedua negosiasi jasa keuangan telah dilakukan di forum *Working Committee on ASEAN Financial Services Liberalisation (WCFSL)* di bawah mandat *4th ASEAN Finance Ministers' Meeting (AFMM)* di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 26 Maret 2000. Pada putaran negosiasi ini, komitmen sektor jasa keuangan non-perbankan Indonesia masih belum berubah dari komitmen Indonesia yang ada di WTO. Perubahan komitmen dilakukan di sektor perbankan dengan meningkatkan komitmen liberalisasinya pada mode 3 yaitu dengan memberikan tambahan komitmen agar investor asing dapat memiliki saham bank lokal yang tercatat di bursa efek sampai dengan maksimal sebesar 51%. Putaran perundingan ini selesai dilakukan dengan ditandatanganinya *Protocol to Implement the Second Package of Commitments of Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* pada tanggal

6 April 2002 di Yangon, Myanmar.

Pada setiap putaran perundingan, masing-masing negara anggota ASEAN diharapkan dapat memberikan komitmen tambahan. Pada putaran perundingan ketiga jasa keuangan, Indonesia memberikan tambahan komitmen pada sektor jasa keuangan perbankan dengan memperbolehkan bank asing membuka dua kantor cabang dan dua kantor cabang pembantu. Sedangka pada komitmen sebelumnya bank asing dibatasi hanya boleh memiliki 1 kantor cabang dan kantor cabang pembantu. *Protocol to Implement the Third Package of Commitments of Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* sebagai hasil dari negosiasi putaran ketiga jasa keuangan ditandatangani pada *9th ASEAN Finance Ministers' Meeting (AFMM) di Vientiane*, Laos pada tanggal 6 April 2005.

Sektor jasa keuangan non-perbankan baru memberikan tambahan komitmen pada negosiasi perundingan putaran keempat dengan memberikan tambahan komitmen pada mode 1 *factoring services* atau dalam istilah Indonesia di sebut jasa anjak piutang, dibuka dengan tanpa hambatan sama sekali. Ini membuka peluang bagi jasa anjak piutang dari negara-negara ASEAN lainnya untuk melakukan transaksi jasa anjak piutang dari negaranya dengan transaksi secara *online* atau jarak jauh, korporat maupun perorangan di Indonesia. Pengesahan selesainya *Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* dilakukan pada pertemuan *12th ASEAN Finance Ministers' Meeting* tanggal 4 April 2008, di Danang, Viet Nam.

Pada putaran kelima Indonesia tidak memberikan tambahan komitmen pada sektor jasa keuangan baik sektor perbankan maupun sektor non-perbankan. Pada putaran ini Indonesia hanya menyampaikan perubahan pada horizontal komitmen dengan menyampaikan perubahan pada metode memperpanjang izin tinggal bagi *business visitor* karena adanya Undang-undang Imigrasi nomor 6 tahun 2011. Pada protokol kelima ini *Schedule of Commitment* (SoC) protokol ini pertama kali dilakukan penggabungan dengan protokol-protokol yang sudah dikomitmenkan sebelumnya sehingga disebut *consolidated schedule of commitment.* Hal ini untuk memudahkan saat membaca SoC tersebut. Putaran ini selesai pada tanggal 4 Mei 2011 saat Vietnam sebagai negara terakhir yang melakukan penandatanganan dengan metode *ad-referendum* yaitu penandatanganan dengan sirkulasi ke setiap negara, tidak seperti protokol sebelumnya yang selalu ditandatangani dalam waktu bersamaan oleh setiap Menteri Keuangan.

Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services merupakan protokol yang pertama kali di dalamnya terdapat komitmen ASEAN *Banking Intergration Framework* (ABIF) di ASEAN. ABIF didirikan atas prakarsa kerjasama regional di bidang perbankan untuk kawasan ASEAN sebagaimana diatur dalam ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS). Negosiasi ABIF dilakukan secara bilateral dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, dengan melakukan negosiasi akses pasar dan cakupan operasional bank-bank di negara ASEAN lainnya berdasarkan kebijakan *Qualified ASEAN Banks (QAB)* yakni bank-bank ASEAN dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati bersama oleh ASEAN. Tujuan utama adanya ABIF adalah untuk membuka akses pasar dan keleluasaan beroperasi bagi QAB di negara anggota ASEAN lainnya. Indonesia menyelesaikan negosiasi komitmen ABIF dengan Malaysia sebagai bagian dari SoC Indonesia di protokol keenam jasa keuangan pada tanggal 1 Agustus 2016. Sedangkan komitmen tambahan Indonesia lainnya adalah hanya menambahkan kota yang *eligible* untuk pembukaan cabang perbankan asing/*joint venture* yaitu Makasar karena adanya

perubahan nama dari Ujung Pandang menjadi Makasar.

Pada protokol ke-7 Jasa Keuangan ASEAN, Indonesia memberikan tambahan komitmen dengan merinci jasa *non-life insurance*, yang telah dikomitmenkan sejak WTO menjadi: (i) konvensional dan (ii) takaful. *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* di tandatangani secara *ad-referendum* dan selesai penandatanganan pada tanggal 23 Juni 2016.

Hampir sama dengan protokol ke-7, pada protokol ke-8 Indonesia menyampaikan komitmen tambahan berupa penegasan komitmen *life insurance* yang sudah dikomitmenkan sebelumnya dengan merinci menjadi komitmen *life insurance* yang mencakup konvensional dan takaful/syariah. *Protocol to Implement the Eighth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* selesai dilakukan penandatanganan oleh para Menteri Keuangan ASEAN pada tanggal 5 April 2019.

Sedangkan untuk protokol terakhir jasa keuangan di bawah AFAS yaitu *Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services* sudah selesai negosiasinya pada bulan Maret 2021. Pada protokol tersebut, Indonesia memberikan komitmen pembukaan akses investasi jasa *money remittance* dan perdagangan lintas batas jasa asuransi *maritime, aviation and good in transit*. Sampai saat ini protokol dimaksud belum selesai dilakukan penandatangan.

Implementasi Protokol Jasa Keuangan

Implementasi protokol jasa keuangan di bawah AFAS dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang jasa di antara negara-negara anggota dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, diversifikasi kapasitas produksi dan pasokan dan distribusi jasa dari pemasok jasa mereka di dalam dan di luar ASEAN; menghilangkan secara substansial hambatan perdagangan jasa di antara negara-negara anggota.

Agar setiap protokol tersebut dapat diimplementasikan maka masing masing negara harus melakukan prosedur internal ratifikasi. Indonesia telah selesai melakukan ratifikasi sampai dengan protokol ketujuh jasa keuangan dengan instrumen hukum sebagai berikut :

1. Ratifikasi *ASEAN Framework Agreement on Services* dengan Keputusan Presiden No. 88 tahun 1995;
2. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Initial Package of Commitments Under The ASEAN Framework Agreement On Services;*
3. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Second Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement On Services;*
4. Perpres No. 51 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Third Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement On Services*;
5. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement on Services*;
6. Pengesahan protokol keenam jasa keuangan adalah protokol yang pertama kali mengacu pada ketentuan pada Undang-Undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Pada Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Perdagangan diatur bahwa setiap perjanjian perdagangan internasional yang membuka akses pasar wajib disampaikan kepada

DPR. DPR melakukan pembahasan untuk memutuskan ratifikasi melalui Undang-Undang atau Perpres. Pada saat ratifikasi protokol ini DPR memutuskan bahwa ratifikasi protokol keenam jasa keuangan dilakukan dengan pembentukan Undang-undang. Untuk itu, maka disusun Undang-undang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement Services*;

7. Pada protokol ketujuh jasa keuangan dilakukan hal yang sama dengan protokol keenam jasa keuangan dan disusunlah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services.*

Transformasi AFAS Menjadi ATISA

Pada perkembangannya AFAS sebagai dasar dari pembukaan akses pasar di ASEAN dianggap sudah tidak memadai lagi maka disepakati bahwa akan dibentuk perjanjian khusus Perdagangan Jasa ASEAN yang akan menggantikan AFAS. Perjanjian tersebut selanjutnya disebut sebagai *ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA).* Perjanjian ini merupakan peningkatan dari kerangka perjanjian jasa ASEAN *(ASEAN Framework Agreement on Services/AFAS)*. Kesepakatan untuk memulai pembahasan ATISA dilakukan pada sidang *ASEAN Economic Minister Meeting* ke-44 di Siem Reap, Kamboja pada tahun 2012 lalu. Komitmen yang diberikan pada perjanjian ATISA merupakan komitmen AFAS paket terakhir, yang terdiri atas AFAS paket ke-10, AFAS Keuangan Paket ke-9, dan AFAS Transportasi Udara Paket ke-11. Paket tersebut telah ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, dan Menteri Perhubungan ASEAN.

ATISA ditandatangani pada tanggal 23 April 2019 di Phuket, Thailand oleh para Menteri Ekonomi ASEAN. Perjanjian tersebut menegaskan komitmen ASEAN untuk mendukung perdagangan bebas dan terbuka serta adanya integrasi ekonomi regional, terhadap tantangan multifaset dari ketegangan perdagangan, pandemi global, dan ketidakpastian ekonomi saat ini.

Dengan selesainya pembahasan ATISA maka salah satu yang harus dilakukan oleh masing-masing Negara Anggota ASEAN (AMS) adalah melakukan transisi AFAS paket ke-10, AFAS Keuangan Paket ke-9, dan AFAS Transportasi Udara Paket ke-11 yang ada di bawah AFAS berdasarkan pendekatan daftar positif (*positive list*), menjadi *Schedules for Non-Conforming Measures for Financial Services* berdasarkan pendekatan daftar negatif dalam jadwal waktu tertentu. Pendekatan daftar negatif di bawah ATISA memberikan transparansi yang lebih besar pada rincian rezim layanan saat ini di AMS, sehingga memberikan pemasok layanan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi pada ekonomi kawasan. Saat ini di WC-FSL sedang dalam proses pembahasan untuk transisi ke *negative list.*

Dukungan Insentif Perpajakan untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Pasar ASEAN

Rudi Handoko[21]

Pendahuluan

Ada beberapa alasan yang menjadikan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) penting bagi Indonesia. *Pertama*, industri TPT merupakan sumber pertumbuhan ekonomi. Menurut data BPS, selama tahun 2022, industri TPT berkontribusi sebesar 6,38% terhadap total PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas. *Kedua*, industri TPT memberikan sumbangan ke cadangan devisa dimana pada tahun 2022 ekspor industri TPT menyumbang devisa sebesar US$13,83 miliar atau 4,74% terhadap total ekspor nasional. *Ketiga*, industri TPT menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup banyak. Pada tahun 2022, proporsi tenaga kerja industri TPT sebesar 2,82 persen tenaga kerja pada sektor industri manufaktur dengan lebih dari 2,5 juta orang. *Terakhir* adalah industri TPT merupakan sumber investasi. Menurut BKPM, pertumbuhan investasi industri ini tercatat sebesar 147% yaitu dari Rp6,1 triliun pada 2021 menjadi Rp15 triliun pada 2022.

Prospek industri TPT ke depannya akan semakin menantang dengan cukup banyak tantangan yang dihadapi industri TPT dalam negeri seperti persaingan dengan negara lain terutama ASEAN, maraknya banjir impor produk TPT dengan harga yang lebih murah, teknologi mesin tekstil yang usang, ongkos produksi yang semakin tinggi, kualitas SDM pertekstilan yang perlu ditingkatkan, serta tantangan digitalisasi maupun isu-isu lingkungan.

[21]Analis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

Grafik 1. Peta Kekuatan Ekspor Industri TPT ASEAN

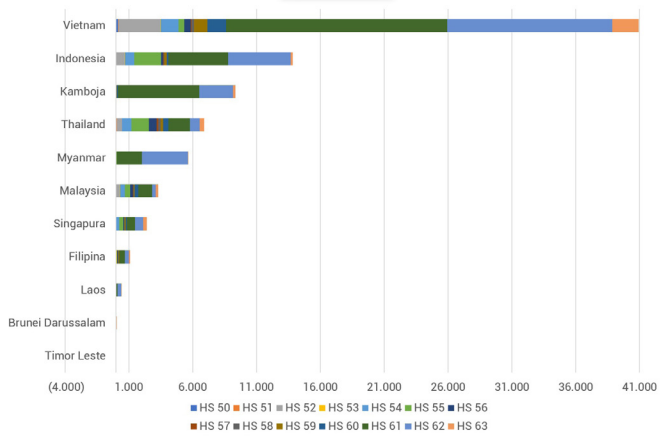

Sumber: Trademap

Peta Persaingan Industri TPT di ASEAN

Sejumlah negara ASEAN merupakan eksportir utama produk TPT yang cukup besar ke dunia. Lima negara besar ekspor produk TPT tahun 2022 adalah Vietnam, Indonesia, Kamboja, Thailand dan Myanmar. Total ekspor produk TPT Vietnam pada tahun 2022 mencapai US$40,9 miliar atau hampir tiga kali lipat total ekspor produk TPT Indonesia yang sebesar US$13,8 miliar.

Setiap negara ASEAN mempunyai produk TPT ekspor unggulannya sendiri. Misalkan, Myanmar memiliki keunggulan di HS 50, HS 61, HS 62. Thailand hanya unggul untuk dua produk yaitu HS 55 dan HS 61. Kemudian, Kamboja sanggat unggul pada produk Kapas (HS 52) dengan nilai ekspor yang mencapai US$11,8 miliar di tahun 2022. Sementara itu, Vietnam menempati posisi teratas untuk hampir semua produk industri TPT dimana Vietnam unggul di tujuh produk seperti HS 52, HS 54, HS 59, HS 60, HS 61, HS 62 dan HS 63. Indonesia kuat di tiga produk yaitu HS 55, HS 60 dan HS 61.

Ketergantungan Industri TPT pada Bahan Baku Impor

Secara nilai, kapas paling banyak diimpor dengan nilai mencapai US$2,24 miliar pada tahun 2022. Tingginya impor kapas memang diperlukan sebagai bahan baku industri TPT mengingat sektor pertanian Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan kapas industri TPT dalam negeri. Sementara itu, dari sisi volume, serat tekstil nabati lainnya yang paling banyak diimpor yang mencapai 610 ribu ton selama tahun 2022.

Tingginya impor bahan baku seperti kapas, filamen buatan, serat staple buatan menunjukkan bahwa industri pemintalan (serat dan benang) sebagai industri hulu masih menggantungkan kebutuhannya melalui impor. Kondisi ini juga terjadi pada industri kain dimana kebutuhan kain untuk diproses menjadi pekaian jadi tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri sehingga harus mengandalkan pada produk impor.

Akibatnya adalah neraca perdagangan Industri Pemintalan (kode HS 50 - 55) dan Industri Kain (kode HS 56 - 60) masih defisit masing-masing sebesar US$2,0 miliar dan US$3,2 miliar. Sementara itu, neraca perdagangan Industri Konveksi (kode HS 61 - 63) mampu mencatatkan surplus sebesar US$8,9 miliar.

Peluang dan Tantangan Dekarbonisasi Industri TPT

Isu lingkungan menjadi semacam tantangan sekaligus peluang bagi industri TPT untuk memenuhi ketentuan terkait emisi karbon proses produk industri TPT. Menurut peneliti Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO), Sharpe, et al. (2022, sektor tekstil dan garmen menyumbang proporsi emisi karbon global yang signifikan, dengan perkiraan berkisar antara 6 dan 8 persen dari total emisi karbon global, atau sekitar 1,7 miliar ton emisi karbon per tahun. Selain itu, kesadaran masyarakat akan produk TPT yang ramah lingkungan semakin tinggi seperti kampanye *slow fashion* untuk mengurangi limbah tekstil.

Hal tersebut di atas menunjukkan potensi permintaan produk TPT yang ramah lingkungan akan

semakin meningkat. Penerapan proses produksi yang ramah lingkungan dapat membantu Indonesia untuk memenuhi target-target dalam pengendalian perubahan iklim, baik dalam NDC maupun target NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat. Selain itu, penerapan proses produksi yang ramah lingkungan dapat membuka pasar ekspor yang lebih luas seperti proposal Uni Eropa terkai *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) yang jika tidak diantisipasi dapat menghambat ekspor produk TPT ke Uni Eropa yang mencapai US$1,6 miliar atau 11% dari total ekspor produk TPT Indonesia tahun 2022.

Dukungan Insentif Perpajakan untuk Industri TPT

Pemerintah telah menyediakan cukup banyak insentif perpajakan agar industri TPT mampu menjawab tantangan tersebut di atas. *Tax allowance* dapat diberikan atas investasi industri prioritas nasional dengan kriteria a) nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor; b) penyerapan tenaga kerja yang besar; dan c) kandungan lokal yang tinggi. Bentuk fasilitas yang diberikan berupa a) pengurangan Penghasilan neto 30%, b) PPh dividen sebesar 10%, c) penyusutan & amortisasi dipercepat, dan d) tambahan kompensasi kerugian lebih dari 5 tahun.

Berdasarkan PP nomor 78 Tahun 2019, Industri yang memenuhi syarat *tax allowance* adalah:

1. Pemintalan benang, dengan cakupan produk benang dari kapas, polyester, nylon, acrylic, spandex, dan/atau rayon, serta campurannya
2. Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya), dengan cakupan produk kain tenun yang dibuat dengan alat tenun mesin (ATM)
3. Penyempurnaan kain
4. Pencetakan kain
5. Batik
6. Kain rajutan
7. Karpet dan permadani
8. Yang menghasilkan kain keperluan industri
9. Non woven (bukan tenunan)
10. Pakaian jadi (konveksi) dari tekstil
11. Pakaian jadi (konveksi) dari kulit
12. Pakaian jadi rajutan
13. Mesin tekstil, dengan cakupan produk pembuatan mesin rajut, mesin tenun, mesin border, dengan nilai investasi di bawah Rp100 Miliar

Untuk mendorong investasi dan peran pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas inovasi dan SDM yang berkualitas, Pemerintah menyediakan *super deduction* untuk kegiatan litbang dan vokasi serta fasilitas *investment allowance* untuk industri padat karya.

Super Deduction Litbang

Fasilitas *super deduction* litbang berupa Pengurangan Penghasilan Bruto maksimal 300% atas biaya Litbang yang dilakukan di Indonesia bagi industri TPT jika melakukan kegiatan litbang dengan empat tema berikut: a) Pembuatan serat sintetis dan serat alam, b) Pembuatan kain dan bahan baku APD, c) *Technical Textile* dan d) Garmen dan fashion (PMK 153/2020).

Super Deduction Vokasi

Industri TPT dapat memanfaatkan fasilitas *super deduction* vokasi berupa pengurangan penghasilan bruto maksimal 200% atas biaya dalam rangka kegiatan penyediaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu yaitu Teknik Pemintalan Serat Buatan, Teknik Pembuatan Benang, Teknik Pembuatan Kain, Teknik Penyempurnaan Tekstil, Teknik Produksi Pakaian Jadi/Garmen, Kimia Tekstil, Kriya Kreatif Batik dan Tekstil, Teknologi Rekayasa Tekstil, Desain Mode Batik, Desain Mode Tenun, serta Desain Tekstil (PMK 128/2019).

Investment Allowance

Pemerintah juga memberikan *investment allowance* dalam bentuk pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah nilai penanaman modal pada aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang dibebankan selama 6 tahun dengan kriteria dan syarat: a) wajib Pajak badan dalam negeri, b) melakukan investasi pada industri padat karya, c) mempekerjakan tenaga kerja Indonesia minimal 300 orang, d) atas investasi tersebut, belum memperoleh fasilitas *tax allowance*, *tax holiday*, dan fasilitas PPh di KEK.

Berdasarkan PMK nomor 16 Tahun 2020, industri yang memenuhi syarat untuk *investment allowance* adalah:

1. Industri Pemintalan Benang, dengan cakupan produk benang dari kapas, polyester, nylon, acrylic, spandex, dan/atau rayon, serta campurannya.
2. Industri batik
3. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
4. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit
5. Industri Pakaian Jadi Rajutan

Tabel 1. Tarif Preferensi Bea Masuk Produk TPT

Kode HS	Uraian Barang	MFN	ATIGA	AANZFTA	AKFTA	ACFTA	AIFTA	AJCEP	AHKFTA	RCEP-ASEAN
50	Sutra	0% - 10%	0%	0%	0%	0%	0%-5%	0%	0%-4%	0%
51	Wol, bulu hewan halus atau kasar	0% - 10%	0%	0%	0%	0%	0%-5%	0%	0%-4%	0%
52	Kapas	0% - 20%	0%	0%	0%	0%	0%-5%	0%	0%-MFN	0%-15%
53	Serat tekstil nabati lainnya	0% - 10%	0%	0%	0%	0%	0%-5%	0%	0%-MFN	0%-8%
54	Filamen buatan	0% - 20%	0%	0%	0%	0%	0%-5%	0%	MFN	0%-15%
55	Serat stapel buatan	0% - 20%	0%	0%	0%	0%	0%-5%	0%	0%-MFN	0%-15%
56	Kain kempa, benang halus, dan benang pintal	0% - 15%	0%	0%	0%	0%	4%-5%	0%	0%-12,5%	0%
57	Karpet dan tekstil penutup lainnya	22,5% - 25%	0%	0%	0%	0%	4%-5%	0%	20%-MFN	0%-12%
58	Kain tenunan khusus	5% - 20%	0%	0%	0%	0%	4%-5%	0%	0%-MFN	0%
59	Kain tekstil dilapisi atau dilaminasi	5% - 20%	0%	0%	0%	0%	0%-5%	0%	0%-17,5%	0%-12%
60	Kain rajutan	10% - 15%	0%	0%	0%	0%	5%-6%	0%	4%-MFN	0%-10%
61	Pakaian dan aksesorinya (rajutan)	10% - 30%	0%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	5%-MFN	0%	4%-MFN	0%-MFN
62	Pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan)	15% - 25%	0%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	5%-MFN	0%	12,5%-MFN	0%-15%
63	Barang tekstil lainnya	5% - 35%	0%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	5%-MFN	0%	4%-MFN	0%-15%

Sumber: PKPN, BKF

Tarif Preferensi Bea Masuk Produk TPT

Untuk memperlancar arus perdagangan internasional, Indonesia bersama negara-negara ASEAN, Australia, Selandia Baru, Korea, India, Jepang, Hong Kong, dan Tiongkok telah membentuk perjanjian perdagangan sehingga bea masuk preferensi produk TPT yang berasal dari negara-negara tersebut relatif rendah bahkan sebagian besar sudah 0%. Hal ini merupakan peluang produk ekspor TPT Indonesia untuk masuk dengan bebas ke negara yang diperjanjikan. Namun, juga merupakan tantangan bahwa produk TPT impor dengan mudah masuk ke Indonesia.

Fasilitas KITE

Industri TPT dapat memanfaatkan fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) yang diberikan atas impor barang dan bahan yang diolah, dirakit atau dipasang untuk tujuan ekspor. Ada tiga fasilitas KITE yaitu KITE Pembebasan Bea Masuk, KITE Pengembalian Bea Masuk dan KITE IKM (Industri Kecil dan Menengah) yang pembebasan bea masuknya diberikan sampai batasan plafon tertentu.

Fasilitas KEK

Fasilitas insentif fiskal yang lengkap dapat diperoleh industri TPT jika melakukan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Industri TPT yang menanamkan modalnya di KEK akan memperoleh sejumlah fasilitas insentif fiskal seperti *tax holiday*, *tax allowance*, fasilitas tidak dipungut PPN/PPnBM, serta fasilitas Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) (PMK 237/2020 stdd PMK 33/2021). Saat ini baru satu KEK yang memiliki industri TPT yaitu KEK Kendal dengan kegiatan utama antara lain industri tekstil dan busana.

Trade Remedies Industri TPT

Industri TPT dalam negeri

yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh *dumping* maupun lonjakan volume impor produk TPT, dapat mengajukan pengenaan bea masuk tindakan (*trade remedies*) atas produk impor. Sampai saat ini, Pemerintah telah mengeluarkan regulasi Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk Serat Polyster Staple Fiber (PSF) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk produk benang, kain, karpet/ permadani, tirai & kelambu, serta pakaian jadi.

Penutup

Pemerintah menyadari pentingnya Industri TPT bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan dukungan ke industri TPT dalam bentuk antara lain insentif perpajakan seperti *tax allowance, tax holiday, super deduction*, KEK, KITE, tarif preferensi BM dan *trade remedies*.

Dengan pemberian insentif perpajakan ini diharapkan industri TPT dapat meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk, memperkuat keterkaitan antara industri hulu, antara dan hilir, meningkatkan kualitas SDM pertekstilan, melakukan modernisasi mesin-mesin produksi untuk meningkatkan produktivitas serta menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan, memperluas pasar ekspor dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Terakhir, mengingat setiap negara ASEAN memiliki keunggulan tersendiri di produk TPT, Indonesia dapat menginisiasi program kerjasama industri TPT lingkup ASEAN (AICO).

Nyala *Fatherman* dari Balaikota

Rosyid Bagus Ginanjar[22]

Secangkir kopi dari *brand* lokal menemani perbincangan Tim Warta Fiskal sore itu di Jalan Merdeka Selatan. Suasana terasa hangat kala semburat cahaya matahari perlahan merangkak dari celah jendela kaca ruang kerja Dr. Nasruddin Djoko Surjono, Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta.

"Urip iku urup, seperti matahari sore ini yang bisa memberi kehangatan bagi kita semua," ungkap Pak Nas memecah tawa kami bersama.

Ia bercerita tentang filosofi 'urip iku urup' bahwa hidup harus menyala. Artinya, hidup kita harus dapat memberi manfaat bagi orang lain sebagaimana matahari yang menyinari semua umat manusia. Oleh karena itu, Alumni Ajou University Korea Selatan ini menekankan pentingnya 'hijrah' dalam artian keluar dari zona nyaman untuk memperluas jangkauan kemanfaatan.

"Hidup itu seperti lomba *marathon*. Siapa yang bisa bertahan dari *start* hingga garis *finish* maka ia berhak mendapatkan medali," katanya.

Pak Nas menjadikan lari marathon sebagai analogi kehidupan sebab mudah dicerna dan sederhana. Ia memilih kata *marathon* dibandingkan lari *sprint*, maknanya sebagai anjuran agar jangan terburu-buru dan tergesa-gesa. Nikmati saja perjalanan hidup sambil

[22]Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

mengasah gergaji, kalau sewaktu-waktu dibutuhkan maka harus siap digunakan. Ia mengartikan asah gergaji dengan terus berlatih dan belajar sesuai bidang masing-masing.

Filosofi inipun ia pakai dalam meniti karir pertama kali di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tahun 2007 ia kemudian pindah ke Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Januari 2020 Pak Nas hijrah ke Balaikota dan dipercaya menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Awal menjabat sebagai Kepala Bappeda merupakan tantangan yang sangat kompleks karena bertepatan dengan pandemi Covid-19 yang menyebar secara global. Tentu hal ini adalah kenyataan yang harus dihadapi tak terkecuali perekonomian ibukota kala itu lesu imbas adanya pembatasan mobilitas dari pemerintah.

Doktor jebolan Universitas Indonesia ini bersama jajaran Pemda Jakarta kemudian menyiapkan langkah strategis agar pembangunan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pemda Jakarta mempunyai peran sentral dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya dengan mensinergikan kebijakan APBD untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah.

Bersiap Tak Jadi Ibukota

DPR resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) melalui Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen beberapa waktu lalu. Hal ini berarti Jakarta tidak akan lagi menjadi Ibukota negara. Jakarta akan berubah status dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) seiring berpindahnya ibu kota RI ke IKN. UU IKN tersebut mengamanatkan perlunya mengganti UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kami harus bersiap menjadi DKJ sebagaimana kota metropolitan umumnya. Sebagai Kepala BP BUMD Jakarta, kami punya segudang perencanaan untuk menata pengelolaan air limbah, air minum, sampah, dan transportasi massal," kata pria berkacamata kelahiran Semarang tersebut.

Perubahan status ini mengharuskan Jakarta punya *taste* baru sebagai warna identitas daerah. Nantinya, kedudukan dan fungsi Jakarta adalah sebagai pusat perekonomian nasional. Pusat perekonomian tersebut mencakup pusat perdagangan, jasa, keuangan, serta bisnis nasional dan global. Sedangkan pola pemerintahan tetap seperti saat ini dengan dipimpin oleh gubernur serta wali kota dan bupati pada setiap kota dan kabupaten administrasinya.

"Pada prinsipnya kami harus bisa beradaptasi dengan segala perubahan. Termasuk dalam hal memberikan kontribusi pembangunan baik tingkat lokal maupun nasional," ucapnya.

Selama ini, Jakarta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, barang, dan jasa bertahun-

tahun lamanya. Hal-hal yang telah tumbuh pesat akan terus dipertahankan dan tidak boleh melambat. Hampir 30 persen produk domestik bruto (PDB) di seluruh Pulau Jawa disumbang dari DKI Jakarta. Sementara itu, 17 persen PDB Indonesia dari DKI Jakarta.

Dengan tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara, menjadi tantangan dan peluang Jakarta untuk melakukan revitalisasi dan pengembangan kota yang baik. Slogan 'Sukses Jakarta untuk Indonesia' merupakan komitmen mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Jakarta sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia, memiliki hubungan mengikat dengan kota-kota lain, serta berdampak langsung pada urusan sosial dan ekonomi global serta berkontribusi terhadap suksesnya pembangunan Indonesia.

"Tugas kami adalah bekerja sebaik-baiknya untuk mempersiapkan itu. Buktinya, Gubernur Jakarta sebagai pimpinan kami alhamdulilah puas dengan kinerja yang telah dilakukan jajaran di bawahnya," lanjut Pak Nas yang berpengalaman sebagai inisiator *Tax Expenditure Report* saat masih di Kementerian Keuangan.

Dekat dengan Keluarga

Meski sibuk dengan beragam agenda pekerjaan di balaikota, Pak Nas selalu meluangkan waktu untuk bercengkerama dengan keluarga terutama saat *weekend*, Ia mengosongkan semua jadwal di hari Sabtu dan Minggu agar bisa menghabiskan *family time* dengan kelima anaknya walau sekadar makan bareng. Sebagai seorang Ayah, ia ingin memastikan perkembangan putra-putrinya: Erawan, Erika, Ervan, dan kedua adik agar sesuai yang diharapkan.

Pak Nas percaya bahwa keberhasilan dalam pekerjaan tidak boleh merusak keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, ia menyempatkan waktu untuk piknik akhir pekan atau sekadar bercengkrama di ruang keluarga. Kebersamaan ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga tetapi juga oleh rekan-rekan kerjanya. Ia dikenal sebagai sosok pendengar yang baik. Tak jarang beberapa alumni ITB dan UI, penerima beasiswa KOICA, dan teman kerja di kantor Kementerian Keuangan sering bersilaturahmi ke ruang kerjanya. Kelembutan dan kehangatan yang dimilikinya sebagai seorang ayah dan suami menciptakan atmosfer positif bagi orang-orang di sekitarnya.

"Keluarga memberi saya kedalaman makna dalam hidup. Mereka adalah cermin yang menunjukkan nilai-nilai sejati, integritas, dan kepemimpinan yang saya bawa dalam pekerjaan. Mereka mengajarkan saya kesabaran, empati, dan dedikasi yang saya terapkan dalam melayani masyarakat," kata pria yang sering mengisi hari libur dengan bermain musik piano.

Pak Nas memahami bahwa sukses sejati tidak hanya dilihat dari pencapaian di dunia pekerjaan, tetapi juga dari kebahagiaan dan kekokohan hubungan keluarga. Melalui kesederhanaan dan kehangatan, ia membuktikan bahwa seorang pejabat dapat sukses secara profesional sambil tetap menjaga kedekatan dan keutuhan keluarga.

Keberhasilan di lingkungan profesional tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan waktu bersama keluarga. Justru, kehadiran keluarga yang selalu memberikan dukungan dan cinta membuat ia mampu menjalani tugas-tugas sebagai pejabat dengan lebih baik. Ia juga ingin memberikan kontribusi yang tidak hanya terfokus pada kepentingan publik, tetapi juga memperhitungkan dampaknya terhadap keluarga-keluarga di dalamnya.

"Ketika saya berada di tengah-tengah keluarga, saya mendapatkan inspirasi baru, ketenangan batin, dan semangat yang membara untuk terus berjuang dalam tugas-tugas saya sebagai seorang pejabat. Kehadiran keluarga adalah anugerah yang selalu saya syukuri, dan mereka adalah sumber kekuatan dalam setiap langkah yang saya ambil," pungkas suami dari Maskani Rambe tersebut.

Skotlandia di Musim Dingin: Liburan tak Terlupakan dengan Atraksi Bersejarah dan Budaya

Wignyo Parasian[23]

Skotlandia merupakan salah satu negara dengan pesona alam serta budaya yang menarik. Negara bagian di utara Inggris ini memiliki segudang pesona yang membuat para wisatawan penasaran untuk menjelajahinya. Namun, bagaimana jika anda ingin mengunjungi Skotlandia saat musim dingin? Apakah anda akan menemukan salju, kembang api, atau kabut tebal? Dalam artikel ini, saya akan berbagi pengalaman ketika bepergian ke Skotlandia selama satu minggu pada bulan Desember, tepatnya pada tanggal 21 hingga 27. Mulai dari tempat-tempat yang dikunjungi hingga tips dan trik untuk menikmati perjalanan di suhu dingin, semua akan saya kupas tuntas di sini.

Awal perjalanan saya dimulai dari Nottingham pada pukul enam pagi dengan menggunakan kereta api menuju Glasgow. Suasana pagi itu masih gelap karena pada musim dingin hari baru mulai terang sekitar pukul delapan. Meski tidak ada salju turun saat itu, saya sudah bersiap dengan pakaian lapis dengan mantel tebal karena suhunya sangat dingin juga angin yang kencang. Perjalanan ke Glasgow sendiri memakan waktu kurang lebih enam jam, dimana saya transit terlebih dahulu di Kota Manchester dan Preston

[23]Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

sebelum akhirnya sampai di Glasgow.

Sesampainya di sana saya memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu karena sudah lapar. Setelah perut sudah terisi, saya melanjutkan memulai tur untuk melihat-lihat kota Glasgow. Destinasi pertama saya yakni menuju George Square, sebuah alun-alun yang dikelilingi oleh beberapa bangunan maupun monumen penting. Kebetulan di sana juga sedang berlangsung *christmas market* yang menambah semarak suasana. Tempat ini merupakan salah satu atraksi yang menarik saat musim dingin karena kita dapat menemukan barang-barang unik, makanan dan minuman lezat, serta hiburan dan festival yang meriah. Tidak jauh dari sana terdapat Gallery of Modern Art Glasgow yang sudah berdiri sejak tahun 1996. Museum ini menampilkan berbagai karya seni kontemporer baik dari seniman lokal maupun internasional. Selain itu, Gallery of Modern Art setiap bulannya secara rutin menampilkan eksibisi seni kepada publik.

Terdapat beragam hiburan di malam hari ketika musim dingin tiba. Selain *christmas market*, salah satu hiburan yang saya nikmati di Glasgow yakni Elfingrove. Mengambil lokasi di Kelvingrove Art Gallery and Museum, *event* ini mendirikan tempat *ice skating* temporer terbesar di wilayah Inggris Raya. Efek *lighting* serta *crystal ball*-nya pun sangat indah sehingga membuat pengalaman ketika bermain *ice skating* sungguh menakjubkan. Selain itu, terdapat juga Skate Side Dining dimana kita dapat menikmati hidangan lokal yang lezat dan menghangatkan, seperti haggis, shortbread, dan whisky.

Gambar 1. Glasgow Cathedral

Keesokan harinya saya pergi mengunjungi Glasgow Cathedral, gereja tertua yang berada di Skotlandia. Nuansa gotik terasa kental sekali pada arsitektur gereja ini dimana baik interior maupun eksterior bangunan masih mengusung desain abad pertengahan. Di belakang katedral, terdapat sebuah komplek pekuburan bernama Glasgow Necropolis dengan bangunan makam yang klasik. Lokasinya yang berada di atas bukit juga menambah daya pikat bagi para pengunjung untuk berfoto dengan lanskap Kota Glasgow.

Setelah menikmati sejumlah bangunan maupun karya seni, saya memutuskan untuk pergi melihat taman bunga di Glasgow Botanic Gardens. Berdiri sejak tahun 1817, tempat ini menyimpan beraneka ragam koleksi tanaman, dimana yang terkenal antara lain Anggrek Dendrobium dan Begonia. Tempat favorit di wilayah ini yaitu Kibble Palace, sebuah rumah kaca dengan lapisan besi yang memiliki

Gambar 2. Ross Fountain

luas dua kilometer persegi. Di dalamnya, kita dapat melihat tanaman pohon pakis Australia yang sudah berumur lebih dari seratus tahun serta beberapa patung dari seniman pesohor. Selain itu, area ini juga memiliki kebun herbal serta taman mawar yang telah dibuka secara resmi pada tahun 2003 silam.

Puas selama dua hari mengelilingi Glasgow, esok harinya saya pun melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya di Skotlandia, yakni Edinburgh. Kota ini tidak begitu jauh dari Glasgow dengan jarak tempuh kurang lebih satu jam menggunakan bus antar kota. Impresi pertama saya akan kota ini adalah indah. Begitu banyak bangunan dengan desain klasik yang bagi saya sangat memanjakan mata.

Destinasi pertama saya di Edinburgh yakni Scott Monument, sebuah bangunan yang didedikasikan bagi penulis kenamaan Skotlandia, Sir Walter Scott. Monumen ini merupakan salah satu landmark ikonik yang dimiliki Edinburgh dengan tinggi sekitar 60 meter. Tidak heran banyak wisatawan yang mengabadikan fotonya di sini ketika berlibur di Edinburgh. Setelahnya, saya pergi menuju National Galleries of Scotland. Kebetulan jarak keduanya cukup dekat, kurang lebih lima menit jalan kaki. Di dalam galeri ini terdapat beragam koleksi seni rupa mulai dari era Renaissance hingga abad ke-20 yang dapat kita nikmati secara cuma-cuma.

Tidak jauh dari museum tersebut saya menuruni rangkaian anak tangga untuk menuju ke destinasi berikutnya yakni Princess Street Gardens. Tempat ini merupakan sebuah taman kota yang sejatinya sebagai penghubung antara Kota Lama (Old Town) dan Kota Baru (New Town) Edinburgh. Setiap kali natal tiba, taman ini disulap menjadi *christmas market* yang dilengkapi dengan tempat bermain *ice skating*, bianglala, dan beragam permainan menarik lainnya. Umumnya, masyarakat sering berkumpul di area air mancur yang bernama Ross Fountain. Di tengah air mancur ini terdapat patung yang terdiri atas putri duyung, anjing laut, kepala singa, serta empat orang wanita yang merepresentasikan ilmu pengetahuan, seni, puisi, dan industri.

Pergi ke Skotlandia tidak lengkap rasanya jika tidak menikmati keindahan dari Highlands. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk ikut tur satu hari perjalanan pulang pergi dari Edinburgh-Highlands pada tanggal 24 Desember. Sebenarnya kita dapat menggunakan transportasi bus kota menuju ke sana dengan harga lebih murah dibandingkan mengikuti tur. Namun, waktu

Gambar 3. Glencoe

tempuh yang dibutuhkan jauh lebih lama karena harus transit di beberapa tempat. Selain itu, armada bus ke sana relatif cukup sedikit, sehingga apabila kita ketinggalan bus, maka kita harus bersiap menunggu untuk waktu yang cukup lama.

Tujuan pertama dari tur ini yakni Callander, sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan bus dari Edinburgh. Tidak banyak masyarakat yang tinggal di sini, namun kota ini memberikan kesan pertama bagi kita mengenai wilayah Highlands. Kota ini terkenal akan pertemuan dua sungai yang bernama The Trossachs serta The Pass yang menjadi pintu masuk menuju Highlands. Destinasi berikutnya yakni Glencoe yang berlokasi di Lochaber Geopark Highlands. Tempat ini memiliki pemandangan yang sangat elok dengan latar pegunungan Glencoe. Adapun gunung ini telah terbentuk ribuan tahun lalu sebagai hasil dari pergeseran gletser serta erupsi vulkanik. Keindahan Glencoe sendiri memang begitu menarik perhatian, dimana area ini menjadi tempat pengambilan gambar film James Bond Skyfall serta Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.

Bus kemudian beranjak menyusuri danau Loch Linnhe untuk menuju Fort William. Kota kecil ini terletak di bawah kaki gunung Ben Nevis, gunung tertinggi di wilayah Inggris Raya. Di sana kami mendapatkan kesempatan untuk beristirahat sejenak sambil menyantap makan siang. Setelah perut telah terisi kembali, perjalanan berlanjut ke Glenfinnan Viaduct. Lokasi ini terkenal dengan adegan kereta Hogwarts Express di dalam film Harry Potter. Setelah puas berfoto-foto di sana, bus pun diberangkatkan kembali menuju Edinburgh.

Natal di Skotlandia pun tiba. Perayaan yang penuh dengan tradisi, kehangatan, dan keajaiban itu pun tiba, terlebih dengan melihat hari-hari sebelumnya tentu ada harapan selebrasi di tanggal 25 akan hingar bingar. Namun, ternyata ini jauh dari kenyataan karena saya baru mengetahui bahwa hampir seluruh bisnis di Inggris pada hari Natal itu libur, termasuk

Gambar 4. The Royal Mile

mall, restoran, supermarket, bahkan *christmas market*. Jujur saya cukup kaget melihat ini karena perayaan Natal di Indonesia bisa dikatakan ramai dan mewah, tetapi di Inggris relatif sepi sekali. Masyarakat di sana banyak yang merayakan bersama keluarga di rumah, sehingga aktivitas di luar rumah pun minim. Meski demikian, tempat-tempat wisata masih dapat dikunjungi untuk sekedar berfoto-foto.

Trip Hari Raya Natal ini saya awali dengan mengunjungi Old Town Edinburgh, dimana terdapat serangkaian bangunan klasik yang sangat cantik. Salah satu lokasi beken untuk berfoto-foto di sana yaitu The Royal Mile. Di sini kita dapat merasakan kentalnya nuansa kerajaan Inggris pada abad pertengahan dan seringkali kita juga akan menemukan beberapa warga lokal yang menggunakan Kilt, pakaian tradisional Skotlandia. Jika ingin berfoto dengan latar yang lebih berwarna, terdapat sebuah jalan bernama Victoria Street di dekat The Royal Mile. Bangunan di sepanjang jalan tersebut memiliki warna yang beragam ditambah kontur jalan yang unik, sehingga cocok untuk di-*posting* di Instagram. Setelah menyusuri area The Royal Mile, kita akan menemukan Edinburgh Castle di ujung jalannya. Kastil ini tercatat sebagai benteng pertahanan tertua di Eropa, dimana di dalamnya terdiri atas kediaman kerajaan, garnisun hingga penjara. Jika ingin berfoto-foto saya rekomendasikan untuk mengambil dari Castle Hill karena dari sana kita dapat melihat lanskap dari Kota Edinburgh dari kastil ini, sungguh elok.

Selepas melihat keindahan bangunannya, kali ini saya beralih untuk melihat bentang alam yang dimiliki Edinburgh. Pertama-tama saya pergi menuju Dean Village. Sungguh menyenangkan untuk meluangkan waktu di sini dengan menyusuri jalan di sepanjang sungai Water of Leith yang begitu jernih sambil menghirup segarnya udara. Di sini kita juga dapat melihat banyak rumah yang mengusung konsep abad pertengahan dengan corak warna yang beragam serta keranjang bunga gantung, sangat

Gambar 5. Palace of Holyroodhouse

klop untuk dijadikan tempat berfoto. Tidak jauh dari situ, kita dapat menemukan Circus Lane yang merupakan salah satu lokasi favorit para fotografer. Sekilas tempatnya hanyalah sebuah jalan kecil biasa, namun seluruh rumah di sana memiliki pot serta keranjang gantung yang memunculkan kesan warna warni dengan motif bunga. Dengan mengambil latar gedung Saint Stephen's Theatre, dijamin hasil fotonya akan ciamik. Hari ini ditutup dengan mengunjungi Calton Hill untuk melihat panorama dari kota Edinburgh. Berhubung lokasinya berada di perbukitan, jalan menuju ke sana harus melewati beberapa anak tangga yang relatif curam, meskipun terdapat jalur bagi kendaraan untuk sampai langsung ke atas. Di sini kita juga dapat melihat National Monument yang menggambarkan replika Kuil Parthenon di Athena, Yunani.

Gambar 6. National Museum of Scotland

Di hari berikutnya tanggal 26 Desember, saya melanjutkan perjalanan untuk mengujungi kawasan Holyrood Park. Taman kota ini begitu luas dan indah dengan bukit serta tebing yang membentuk pemandangan Edinburgh. Saya begitu menikmati udara segar dan pemandangan alam yang menakjubkan di sini. Selain itu, di sini juga kita dapat melihat St Anthony's Chapel, sebuah reruntuhan gereja abad pertengahan, serta Duddingston Loch yang merupakan danau air tawar tempat banyak burung air tinggal.

Saya kemudian memutuskan untuk mendaki Arthur Seat, meskipun cuacanya sangat dingin dan berangin. Arthur Seat sendiri adalah puncak tertinggi di Holyrood Park dan merupakan sisa dari gunung berapi kuno. Ketika mendakinya kita harus berhati-hati karena jalannya yang licin dan berbatu. Namun, setelah sampai di puncak, hati terasa sangat puas dan terpesona melihat pemandangan kota Edinburgh yang spektakuler. Selepas dari Arthur Seat, saya berjalan menuruni bukit dan menemukan istana bernama Palace of Holyroodhouse. Istana ini merupakan kediaman resmi Ratu Elizabeth II di Skotlandia serta tempat tinggal raja dan ratu Skotlandia sejak abad keenambelas. Saya sangat terkesan dengan arsitektur dan dekorasi istana yang begitu megah dan mewah.

Berhubung hari ini merupakan perayaan Boxing Day di

Inggris, maka tidak lengkap rasanya jika kita tidak pergi berbelanja. Sedikit informasi, Boxing Day berasal dari tradisi memberikan hadiah dalam kotak kepada para pelayan atau pegawai pada masa lalu. Namun, boxing day sekarang lebih dikenal sebagai hari dimulainya musim diskon atau penjualan pasca Natal. Saya menemukan banyak barang unik, seperti pakaian, buku, maupun cinderamata khas Skotlandia dengan diskon yang besar. Tentu ini waktu yang sangat tepat untuk berbelanja.

Tidak terasa sudah memasuki tanggal 27 Desember. Artinya ini adalah hari terakhir dari rangkaian perjalanan saya di Skotlandia. Oleh karena itu, saya menetapkan untuk berkunjung ke National Museum of Scotland. Museum ini sangat besar, kita bisa seharian penuh untuk mengelilingi seluruh bagiannya. Terdapat berbagai benda bersejarah di dalamnya, seperti pedang, helm, perhiasan, dan pakaian yang digunakan oleh para raja dan ratu Skotlandia. Selain itu, saya juga melihat berbagai artefak dari berbagai negara dan zaman, misalnya Mesir, Yunani, dan Romawi. Di sini kita juga dapat belajar banyak tentang hewan, tumbuhan, planet, serta beberapa penemuan yang berpengaruh pada perkembangan teknologi, contohnya mesin uap, telepon, dan radio.

Secara keseluruhan, saya dapat menyimpulkan bahwa Skotlandia merupakan negara yang sangat indah dan menarik, terutama ketika musim dingin. Di Glasgow kita dapat merasakan sebuah kota yang ramah dan dinamis, lalu Edinburgh dengan segala sejarah dan kemegahannya, serta Highlands yang spektakuler nan dramatis. Bagi kalian yang ingin berkunjung ke Skotlandia di musim dingin pastikan untuk mempersiapkan pakaian hangat dan nyaman mengingat suhunya yang sangat dingin dan berangin. Jangan lupa untuk membawa jaket, syal, sarung tangan, topi, dan sepatu bot. Di samping itu, kalian juga dapat mengikuti festival Hogmanay, pesta tahun baru di Skotlandia yang sangat meriah dan spektakuler. Ini satu hal yang disayangkan karena saya tidak sempat untuk mengikutinya, berhubung saya harus kembali ke Nottingham sebelum tahun baru. Di akhir kata, saya merekomendasikan anda untuk pergi mengunjungi Skotlandia di musim dingin. Dijamin anda tidak akan menyesal.

Melangkah Dengan Ketangguhan

Indrawan Susanto[24] & Chintya Pramasanti[25]

Ketika memandang belakang ke serangkaian peristiwa hidup, terlihat jelas bahwa kehidupan ini adalah perjalanan penuh warna, penuh liku, dan penuh tantangan. Ketangguhan, sebagai penentu esensial dalam menjalani hidup, menjadi kunci utama meraih kebijaksanaan dan kebahagiaan sejati.

Menghadapi perubahan dan ketidakpastian adalah ujian pertama ketangguhan. Hidup seperti lautan yang selalu bergerak; gelombang tak terduga datang dan pergi. Dalam momen sulit, ketangguhan muncul sebagai kekuatan untuk menghadapi arus tak terduga ini. Seperti bambu yang merunduk tetapi tidak patah dalam badai, kita perlu belajar menjadi elastis, mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan.

Namun, ketangguhan bukan hanya tentang bertahan, melainkan tumbuh dan berkembang di tengah tantangan. Saat dihadapkan pada kesulitan, waktu yang paling berharga untuk memahami potensi dalam diri kita. Ketangguhan melibatkan kemampuan untuk belajar dari pengalaman, memetik hikmah dari setiap pukulan hidup, dan menjadikannya sebagai batu loncatan menuju kedewasaan spiritual.

Pentingnya ketangguhan semakin terlihat dalam cara kita merespon kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir segalanya, melainkan tiket menuju perbaikan diri dan pencapaian lebih besar. Di balik kegagalan terdapat pelajaran berharga yang tidak akan kita temukan di jalur kemenangan. Ketangguhan memampukan kita bangkit kembali, melihat kegagalan sebagai kesempatan tumbuh, bukan batasan untuk merundung diri.

Seiring berjalannya waktu, ketangguhan membentuk karakter kita. Karakter bukanlah sesuatu yang diberikan secara instan, tetapi hasil dari proses panjang dan penuh tantangan. Di ujian hidup, karakter kita diuji, dan ketangguhan menentukan apakah kita muncul sebagai pribadi kuat atau merosot dalam keputusasaan. Memahami nilai-nilai yang kita pegang teguh, bahkan di tengah badai, adalah bentuk ketangguhan sejati.

Ketangguhan juga diuji dalam hubungan interpersonal. Konflik, kekecewaan, dan perpisahan tak terhindarkan. Ketangguhan kunci dalam menjaga keseimbangan emosional, memahami bahwa setiap hubungan membawa pembelajaran berharga. Memberikan keberanian untuk memaafkan, menerima, dan terus melangkah meski hati terluka.

Ketangguhan adalah perjalanan tak pernah berakhir. Ia tumbuh bersama kita, mengukir jejak keberanian di setiap langkah. Mari jadikan ketangguhan sahabat setia, bukan hanya sebagai alat bertahan, melainkan pemandu ke kedalaman makna dan kebijaksanaan sejati menjalani hidup ini.

[24,25]Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

AIFED 2023: Diskusi Solusi Fragmentasi Ekonomi Dunia

Bali, (06/12/2023) – *Annual International Forum on Economic Development and Public Policy* (AIFED) kembali diselenggarakan untuk ke-12 kalinya di Nusa Dua, Bali, pada tanggal 6-7 Desember 2023. AIFED, diselenggarakan setiap tahun oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan untuk mendiskusikan kebijakan, serta mempertemukan akademisi, ekonom, profesional, dan pembuat kebijakan dalam satu *platform* untuk berdiskusi dan menawarkan solusi yang bisa diterapkan terhadap masalah paling mendasar yang dihadapi Indonesia. Indonesia telah melaksanakan peran besar untuk menciptakan diskusi antar beberapa grup yang berbeda bukan hanya dalam konteks domestik tapi juga dalam konteks internasional untuk bersatu dalam keberagaman.

"Indonesia akan terus berperan lebih dalam agenda internasional, manfaatnya bukan hanya untuk kepentingan dunia tapi juga untuk kepentingan masyarakat Indonesia untuk mencapai Indonesia maju 2045", ujar Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, dalam sambutan AIFED 2023.

Dalam pidato pembukaannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa dunia kini berada di era yang ditandai dengan semakin meningkatnya fragmentasi ekonomi, perubahan cara pandang dalam memandang proses hubungan internasional, perdagangan, dan lebih ekstrim kebangkitan nasionalisme yang melihat negara lain sebagai musuh alih-alih sebagai teman.

Menkeu juga mengatakan kebijakan fiskal terbukti efektif memainkan peran penting sebagai peredam guncangan (*shock absorber*), menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang solid. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk melaksanakan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing di tingkat dunia melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan institusi.

Dalam forum kerja sama ekonomi internasional, Indonesia secara proaktif berkontribusi dalam penetapan agenda global dan penyelesaian masalah global. Selama Presidensi G20 tahun lalu dan ASEAN Chairmanship tahun ini, kepemimpinan Indonesia memainkan peran penting dalam 12 dari 14 *driving key outcomes* seperti terbentuknya Dana Pandemi, Mekanisme Transisi Energi, Taksonomi ASEAN untuk Keuangan Berkelanjutan, dan Kerangka Transaksi Mata Uang Lokal ASEAN.

"Banyak hal yang sudah kita lakukan, namun saya berharap kita bisa terus mengkritisi diri sendiri, mencermati pencapaian kita sendiri, dan kekurangan pencapaian agar kita bisa terus berkembang dan membuat kemajuan" jelas Menkeu.

Menkeu Kembali Ajak Dunia Dukung Transisi Menuju Energi Bersih

Berlin, (29/09/2023) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menyuarakan tentang perlunya dunia untuk mendukung proses transisi menuju energi bersih pada agenda *Berlin Global Dialogue* (BGD). BGD merupakan forum diskusi global para pemimpin negara, pebisnis dan akademisi dunia. BGD tahun 2023 kali ini merupakan kegiatan pertama yang baru diselenggarakan dan menghadirkan Presiden, Menteri, Akademisi dan CEO perusahaan internasional, yang secara khusus membahas tentang isu energi dan perubahan iklim serta peluang pembiayaannya. Sebagai negara yang memiliki komitmen tinggi untuk menurunkan emisi, Indonesia memerlukan dukungan pendanaan dari berbagai sumber terutama untuk mendukung transisi menuju energi bersih. Pendanaan yang diperlukan mencapai Rp3.500 triliun atau sekitar USD246 miliar untuk mencapai target penurunan emisi di sektor energi.

Menkeu menegaskan bahwa saat ini pemerintah Indonesia dengan kapasitas fiskal yang sehat telah menyediakan berbagai perangkat, termasuk regulasi dan dukungan fiskal, agar proses transisi energi hijau tersebut dapat direalisasikan di Indonesia. Pemerintah Indonesia secara proaktif telah melaksanakan berbagai langkah kebijakan guna mendorong partisipasi swasta dalam agenda perubahan iklim global, termasuk memperkenalkan berdirinya pasar karbon pada tanggal 26 September 2023 yang lalu.

Proses transisi energi tersebut hendaknya memenuhi aspek adil dan terjangkau bagi semua pihak, termasuk bagi perekonomian nasional yang harus tetap terus bertumbuh untuk mencapai posisi sebagai negara maju. Untuk itu, komitmen dukungan pendanaan dari internasional dan swasta perlu segera direalisasikan.

Menkeu juga menjelaskan bahwa dalam kancah global, khususnya forum G20 tahun lalu, Indonesia telah memperkenalkan *Energy Transition Mechanism* (ETM) *Country Platform* sebagai bentuk *blended finance* menuju transisi energi bersih di Indonesia. Selain itu, Indonesia sebagai ASEAN Chairman tahun 2023 ini juga telah mengeluarkan ASEAN *Green Taxonomy* versi 2, yang memasukkan penghentian awal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai jenis investasi hijau. Saat ini, berbagai komitmen internasional termasuk dari *Climate Investment Fund* (CIF) sebesar USD500 juta, dan *Just Energy Transition Partnership* (JETP) sebesar USD20 miliar belum dapat direalisasikan sepenuhnya. Menkeu menutup diskusi dengan menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi model bagi keberhasilan proses transisi energi hijau secara global, dan diperlukan dukungan dari pemerintah, internasional, serta swasta.

Hadiri Acara Fiscal Day, 100 Anak Muda Aktif Berdiskusi dengan Menteri Keuangan

Bali, (06/12/2023) – 100 anak muda yang terdiri dari ASN dan Mahasiswa Bali berdiskusi mengenai isu-isu kebijakan terkini dalam acara *Fiscal Day* 2023. Acara yang digelar pada Rabu, 6 Desember 2023 di Bali merupakan event tahunan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang bertujuan untuk meningkatkan *awareness* dan pemahaman anak muda khususnya ASN terkait penyusunan kebijakan fiskal.

Membuka acara, Kepala Pusat Kebijakan APBN Wahyu Utomo menyampaikan bahwa tema *Fiscal Day* "Bergegas Menuju Indonesia Emas" bermakna bahwa kita harus bergerak dan berbenah dengan terobosan dan lompatan menuju arah Indonesia yang lebih baik. Wahyu juga mengimbau agar peserta aktif dalam sesi diskusi dan dapat menyampaikan gagasan pemikiran yang konstruktif, *out of the box*, dan inovatif.

Fiscal Day ini terdiri dari dua sesi besar, yaitu diskusi grup "Bergegas Menuju Indonesia Emas" dan *talkshow* dengan tema "Literasi Keuangan Menuju Kebebasan Keuangan". Pada sesi diskusi, peserta berkesempatan menyampaikan ide dan gagasannya secara langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) yang sempat hadir dalam acara tersebut.

Dalam kesempatan ini, Menkeu menyampaikan apresiasinya tehadap anak-anak muda yang sudah berani menyampaikan gagasannya dalam sesi diskusi ini.

"Dari cara anda berdiskusi dan mengidentifikasi isu-isu, Itu sudah menggambarkan kalian memiliki kemampuan untuk memformulasikan suatu kenbijakan," ujar Sri Mulyani.

Menkeu juga berpesan kepada generasi muda untuk terus belajar dan saling bertukar pikiran. Harapannya, acara ini dapat meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang.
Sementara itu, pada *Talkshow* "Literasi Keuangan Menuju Kebebasan Keuangan", dipaparkan mengenai tantangan inklusi keuangan oleh para narasumber.
Ada tiga narasumber yang dihadirkan dalam acara ini, yaitu Analis Kebijakan Ahli Madya BKF Yani Farida; Analis Senior OJK I Gusti Bagus Adi Wijaya; dan *Content Creator* Dion Banggara.

Omnibus Cipta Kerja: Harapan Menata Masa Depan

Anggi Pratiwi[26]

Pada tahun 2020 disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merupakan hasil dari kerja keras pemerintah bersama dengan DPR dalam memangkas regulasi agar menjadi lebih sederhana serta untuk mengubah beberapa undang-undang yang telah ada sebelumnya. Dengan teknik Omnibus Law, sekitar 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal dapat direvisi sekaligus hanya dengan satu UU Cipta Kerja yang mengatur multisektor yang bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat ke daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi problem regulasi yang tumpang tindih, dan menghilangkan ego sektoral.

Dalam buku **Omnibus Cipta**

[26]Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

Kerja: harapan menata masa depan ini akan diulas 11 klaster yang tedapat dalam UU Cipta Kerja. Bagian 1 "Penyederhanaan Perizinan" membahas mengenai tidak adanya perusahan-perusahaan yang merelokasi usaha mereka ke Indonesia setelah melakukan eksodus dari Tiongkok yang disebabkan oleh tiga hal, yaitu faktor risiko, prosedur usaha yang rumit, dan jangka waktu mulai berusaha yang relatif lama. Keengganan tersebut merupakan salah satu ganjalan dalam mendatangkan modal asing ke Indonesia. Adanya transformasi rezim izin dalam UU Cipta Kerja memberikan harapan baru terkait penyederhanaan pemberian izin usaha. UU Cipta Kerja telah menyederhanakan sekitar 700 pasal dari 52 UU yang mengatur tentang perizinan usaha. Dalam UU Cipta Kerja, pemerintah memberikan kemudahan dalam pendaftaran perizinan dengan memberikan paket informasi yang berguna seperti standar usaha dan produk yang jelas. Dengan adanya kemudahan ini, tentunya menjadi tantangan untuk pemerintah dalam pengawasan.

Pada Bagian 2 "Persyaratan Investasi" dijelaskan mengenai penurunan aktifitas perekonomian di Indonesia akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di banyak sektor, salah satunya adalah investasi yang menyebabkan aktivitas perdagangan mengalami kerugian luar biasa. Namun demikian, Indonesia masih memiliki potensi sebagai negara tujuan investasi yang terbukti adanya pemain asing besar yang berkomitmen dalam investasi di Indonesia. Dengan pengesahan UU Cipta Kerja, Indonesia mencapai target realisasi investasi pada tahun 2021. Selain itu terdapat Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertutup pada UU Cipta Kerja, guna mewujudkan instruksi Presiden terkait upaya pentingnya ekosistem investasi. Reformasi investasi melalui UU Cipta Kerja dengan menghapus daftar negatif investasi dan menyisakan enam bidang usaha yang tertutup merupakan terobosan baru yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masuknya penanaman modal asing baru untuk menggiatkan kembali aktifitas perekonomian pasca pandemi Covid-19. UU Cipta Kerja juga diharapkan dapat menyelesailan berbagai permasalahan yang menghambar pertumbuhan investasi sebagai upaya mewujudkan ekosistem investasi yang berkualitas.

Bagian ketiga "Ketenagakerjaan" menjelaskan mengenai UU Cipta Kerja dalam mengelola ketenagakerjaan di Indonesia. Adanya penciptaan lapangan kerja yang mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja diperlukan untuk mengoptimalkan pendayagunaan tenaga kerja agar dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, selain itu pemerintah juga berusaha menarik investasi agar tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat. Penerbitan UU Omnibus Law ini, pemerintah diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan disetiap tahunnya, dapat mendukung ekosistem investasi untuk mengurangi rigiditas pasar tenaga kerja Indonesia sehingga dapat meningkatkan minat berinvestasi di Indonesia, dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif sehinga dapat menyerap lebih banyak pekerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Namun disisi lain, UU Cipta Kerja ini belum mengatur secara jelas mengenai penyandang disabilitas yang merupakan isu penting baik di negara maju maupun negara berkembang. Di Indonesia penyandang disabilitas berjumlah sangat banyak dan mayoritas dalam angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan. Masalah persamaan hal penyandang disabilitas belum diatur secara jelas dalam UU Cipta Kerja terutama dalam hal penggunaan istilah penyandang disabilitas, pemutusan hubungan kerja, jaminan pekerjaan, dan akses untuk penyandang disabilitas. Pemerintah Indonesia perlu untuk lebih mendorong peran penyandang disabilitas dalam perekonomian melalui semangat UU Cipta Kerja dan UU Penyandang Disabilitas.

Kluster keempat pada UU Cipta Kerja dibahas pada Bagian keempat "Kemudahan Pemberdayaan, dan

Perlindungan UMKM" yang menjelaskan mengenai UMKM memiliki peranan yang cukup signifikan terhadap ekonomi nasional dan termasuk jenis usaha yang tahan banting terhadap adanya krisis namun dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda, sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang paling menderita. Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha ialah melalui UU Cipta Kerja dengan adanya peraturan kemudahan berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan UMKM agar memiliki daya saling yang lebih baik. Hal ini memang sudah sewajarnya diberikan mengingat signifikansi kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi secara nasional, walaupun kontribusi yang besar tersebut belum diiringi dengan perhatian yang optimal. UU Cipta Kerja diyakini dapat memberikan dorongan yang cukup besar kepada dunia usaha di Indonesia serta diharapkan sektor UMKM di Indonesia menjadi lebih cepat berkembang.

Selanjutnya pada Bagian 5 "Kemudahan Berusaha" membahas mengenai upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui UU Cipta Kerja yang mendukung kemudahan berusaha, perpajakan, dan telekomunikasi. Hal-hal yang diakomodasi pada undang-undang tersebut terkait dengan kemudahan berusaha ialah mencakup Keimigrasian, Paten, Merek, Perseroan Terbatas, Penghapusan Izin Gangguan, Badan Usaha Milik Desa, Praktik Monopoli, Perpajakan, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah. Pengakomodasian dalam kemudahan berusaha dikarenakan menurut World Bank Group, Indonesia mengalami stagnasi dalam 3 tahun terakhir sehingga perlu adanya upaya-upaya perbaikan. Sementara itu UU Cipta Kerja ini juga mengganti sistem pajak di Indonesia yang semula *single-tier tax system* menjadi *two-tier tax system*. Adanya reformasi perpajakan melalui undang-undang tersebut merupakan hasil dari diskusi panjang yang semakin mendesak dan diimplementasikan akibat munculnya pandemi Covid-19, namun ke depannya Indonesia masih perlu terus melakukan reformasi perpajakan secara berkelanjutan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi global yang dinamis. Kemudian pada sektor telekomunikasi, UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyelenggarakan jaringan telekomunikasi yang merata di seluruh penjuru tanah air sehingga tercipta kemudahan berusaha bagi masyarakat Indonesia, dengan harapan hal ini dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk ke depannya.

Bagian 6 "Dukungan Riset dan Inovasi" pada buku ini membahas mengenai UU Cipta Kerja yang memberikan dukungan terhadap riset dan inovasi yang memungkinkan pemerintah untuk memberikan penugasan kepada BUMN agar dapat melakukan riset dan inovasi, selain itu juga memberikan kepastian hukum bagi BUMN ketika ada penugasan dari pemerintah pusat. Hal ini akan membuka peluang kerja sama antara BUMN, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian. Dengan adanya kolaborasi tersebut maka akan memperkuat R&D (*Research and Development*) Indonesia yang akan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menciptakan lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, UU Cipta Kerja juga merupakan bentuk komitmen pemerintah di tingkat pusat maupun daerah untuk memperbaiki ekosistem inovasi di Indonesia.

Kluster selanjutnya yang dibahas ada di Bagian 7 "Administrasi Pemerintahan" dalam buku ini, yang menjelaskan mengenai adanya perubahan dalam UU Cipta Kerja pada administrasi pemerintahan di Indonesia yang dimaksudkan untuk percepatan pelayanan, percepatan perizinan, dan pelaksanaan program strategis nasional dan kebijakan pemerintah pusat. Namun perlu adanya penjelasan lanjut yang lebih jelas dalam aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja ini agar tidak terjadi pembatasan dan pemangkasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur wilayahnya. Langkah konkret UU Cipta

Kerja terhadap UMKM ialah dengan melakukan deregulasi, yaitu menghapus UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, karena undang-undang tersebut dirasa sudah tidak efektif lagi dan menjadi penghalang bagi pengusaha kecil di era perkembangan teknologi informasi seperti saat ini.

Bagian 8 "Pengenaan Sanksi" menjelaskan mengenai UU Cipta Kerja dan lingkungan, dimana UU Cipta Kerja dirasa telah mengubah ketentuan mengenai lingkungan hidup yang menyebabkan perdebatan di kalangan pemerintah, akademisi, dan pemerhati lingkungan yang dianggap berisiko mengancam kelestarian alam, namun dari sisi lain hal ini merupakan bentuk efisiensi waktu dan biaya dari peraturan sebelumnya. Walaupun terjadi perdebatan dalam penyederhanaan regulasi, analisis dampak lingkungan hidup tetap menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Pemerintah juga memberikan perhatian kepada konsekuensi perubahan ketentuan mengenai tanggung jawab terhadap limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) oleh pelaku usaha.

Selanjutnya ialah Bagian 9 "Pengadaan Lahan" yang menjelaskan mengenai UU Cipta Kerja terkait dengan penyederhanaan perizinan adalah dengan penerapan pendekatan perizinan berbasis risiko. Hal ini berimplikasi bahwa hanya kegiatan-kegaitan yang dianggap berisiko yang diwajibkan untuk mengurus perizinan, sementara yang tidak terlalu berisiko cukup dengan pemenuhan standar yang berlaku. Namun upaya pemerintah untuk mengurangi rigiditas pengadaan lahan ini sudah sepatutnya di apresiasi meskipun ada kekhawatiran dari beberapa sisi dalam implementasi UU Cipta Kerja ini. Pemerintah perlu menelaah kembali pembentukan Bank Tanah karena dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dengan fungsi yang sudah ada.

Bagian 10 "Investasi dan Proyek Pemerintah" dalam buku ini membahas mengenai upaya pemerintah untuk menarik peluang investasi dengan pembentukan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) yang secara resmi diberi nama Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau dikenal dengan sebutan Indonesia Investment Authority (INA). INA bertanggungjawab kepada presiden dan memiliki otoritas penuh dalam membuat keputusan investasi serta melakukan manajemen atas risiko investasi yang dilaksanakannya.

Kluster terakhir dalam UU Cipta Kerja dibahas pada Bagian 11 "Kawasan Ekonomi' dalam buku ini. Bagian ini menjelaskan mengenai Kawasan Ekonomi di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan ekspor. Untuk memudahkan para pelaku usaha dalam melakukan investasi, melalui UU Cipta Kerja pemerintah melakukan beberapa perubahan kebijakan terkait dengan kawasan ekonomi yang mencakup perubahan terhadap kebijakan kawasan ekonomi yang dilakukan mencakup Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Buku ini sangat menarik untuk dibaca sebagai referensi karena merupakan kumpulan artikel-artikel terpilih dari para analis di Kementerian Keuangan yang menganalisis secara kritis dan mengulas 11 kluster dalam Undang-undang Cipta Kerja serta harapan dan tantangan dalam implementasi undang-undang tersebut, sehingga dapat membuka wawasan dan memperkaya literasi pembaca terkait pelaksanaan UU Cipta Kerja. Selamat membaca!

Glosarium

Bilateral Swap Arrangement

Sebuah perjanjian kesepakatan antar negara untuk saling melakukan pertukaran mata uang, dengan menetapkan bunga dan jumlah uang yang akan dipertukarkan selama jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut.

Blended Finance

Penggunaan strategis pembiayaan pembangunan untuk memobilisasi pembiayaan tambahan menuju pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang.

Capacity Building

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan baik individu, kelompok masyarakat maupun lembaga sosial dari aspek ilmu pengetahuan, keterampilan maupun perilaku melalui aktivitas yang menarik.

Climate Investment Fund

Lembaga dana iklim multilateral yang beranggotakan lebih dari 70 negara berpenghasilan rendah dan menengah. CIF mengerahkan pendanaan yang sangat lunak untuk memberdayakan transformasi dalam teknologi bersih, akses energi, ketahanan iklim, solusi berbasis alam, dan bidang-bidang lainnya.

Deputies

Orang yang diangkat sebagai wakil atau pengganti dengan kuasa jabatan untuk bertindak.

Digital Trade

Kegiatan jual beli berbagai aset seperti saham, sekuritas hingga crypto melalui internet, biasanya melalui perantara broker atau *exchange online*.

Epicentrum of Growth

Upaya negara Indonesia untuk memperkuat kerja sama konkret antar negara anggota ASEAN yang bertujuan agar negara-negara ASEAN dapat terus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berpotensi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia.

Investment Allowence

Insentif pajak berupa pengurangan 10 persen pajak penghasilan neto bagi perusahaan-perusahaan padat karya selama 6 tahun.

Just Energy Transition Partnership

Kemitraan global yang disepakati oleh para pemimpin negara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Bali pada tahun 2022 dengan tujuan guna mempercepat transisi energi yang adil menuju keberlanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Maturity Mismatches

Kondisi limpahan dana kelolaan jangka pendek yang tidak bisa diandalkan untuk menutupi pembiayaan jangka panjang.

Pandemic Fund

Lembaga atas komitmen nyata para pemimpin G20 untuk mengantisipasi masalah kesehatan ke depannya, dimana dana tersebut digunakan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons menghadapi pandemi berikutnya.

Ratifikasi

Proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya.

Presidensi G20

Posisi di mana sebuah negara menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan G20 (*Group of Twenty*).

Schedule of Commitment

Suatu daftar mengenai sektor/sub sektor jasa yang dikomitmenkan atau ditawarkan pada perundingan perdagangan dimana strukturnya harus mengacu kepada aturan GATS (*General Agreement on Trade in Services*).

Stock Taking

Istilah pada bidang manufaktur yang merupakan aktivitas menghitung stok barang secara fisik dengan cara mencocokannya barang dengan catatan stoknya yang bertujuan untuk menghindari kesalahan.

Super Tax Dediction

Insentif berupa pengurangan pajak dari penghasilan bruto paling tinggi 200% bagi pelaku usaha dan pelaku industri yang melakukan kegiatan pengembangan vokasi, seperti kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran. Insentif ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, profitabilitas dan daya saing.

Tax Allowence

Salah satu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Pemerintah guna meningkatkan minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Tax Withholding

Sistem pemotongan pajak dari pihak ketiga yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak ketika pemerintah memberikan kepercayaan serta merta kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu memotong atau memungut pajaknya atas penghasilan yang telah dibayarkan kepada penerima penghasilan serta langsung menyerahkannya kepada kas negara.

Two-Pillar Solution

Kebijakan mengenai sistem perpajakan yang bertujuan untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi dan digitalisasi. Two-pillar solution terbagi menjadi dua bagian, yaitu pilar 1 yang berpusat pada redistribusi hak pemajakan dan pilar 2 yang bertujuan untuk memastikan perusahaan multinasional membayar pajak penghasilan.

Tax Holiday

Salah satu bentuk insentif pajak kepada pelaku usaha yang berupa pengurangan hingga pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga dalam jangka waktu tertentu.

Quiz FISKAL!

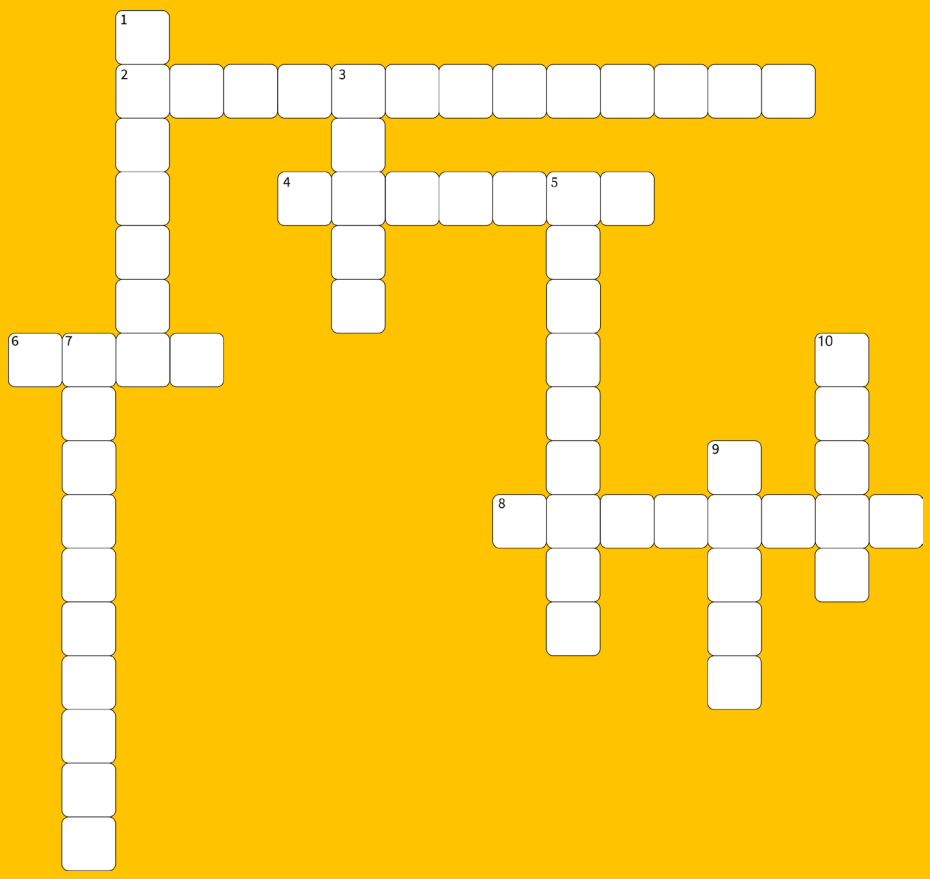

Mendatar

2 Prasarana

4 Tragedi

6 Puau Dewata

8 10 November memperingati hari ….

Menurun

1 Bentuk modernisasi dari penggunaan teknologi

3 Organisasi yang beranggotakan negara Asia Tenggara

5 Perundingan

7 Percepatan

9 Tempat terjadinya jual beli

10 Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara

Ada hadiah menarik bagi yang beruntung, pemenang akan diumumkan pada edisi selanjutnya

Kirim jawaban melalui email ke:
wartafiskal@kemenkeu.go.id

Pemenang Kuis Edisi III/2023:

1. Kharisman Randy Cahyadi

BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Komp. Kementerian Keuangan

Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat 10710
Telp. +62 21-34833486

fiskal.kemenkeu.go.id